

Dinamika Relasi Organisasi Sayap Partai Politik dengan Partai Politik

(Studi Kasus PW GMPI Jawa Tengah dan DPW PPP Jawa Tengah)

Skripsi

Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Johan Taufiqur Rohman
(1806016022)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO SEMARANG
2023**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN
Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara/i:

Nama : Johan Taufiqur Rohman
NIM : 1806016022
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Dinamika Relasi Organisasi Sayap Partai Politik Dengan Partai Politik Studi Kasus PW GMPI Jawa Tengah dan DPW PPP Jawa Tengah.

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segeradiujikan.
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing,



Drs. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP. 196805051995031002
Tanggal : 14 Juni 2023

SKRIPSI

**Dinamika Relasi Organisasi Sayap Partai Politik Dengan Partai Politik
(Studi Kasus PW GMPI Jawa Tengah dan DPW PPP Jawa Tengah)**

Disusun oleh:

Johan Taufiqur Rohman

1806016022

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi

Pada tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Pembimbing



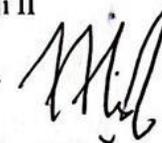
Drs. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP. 196805051995031002

Penguji I



Masrohatun, M.Si.
NIP. 198806212018012001

Penguji II

An. 

Moh. Yamin Darsyah, M. Si.
NIP. 198409092019031007

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Juni 2023



Johan Taufiqur Rohman
1806016022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhmdulillah Wa Syukurilah, Asyhadu Allailahailallah Wa Asyhaduanna Muhammadarrasulullah, Allahumma Sholiala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad.

Alhamdulillah atas semua nikmat yang diberikan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Dinamika Relasi Organisasi Sayap Partai Politik Dengan Partai Politik Studi Kasus PW GMPI Jawa Tengah dan DPW PPP Jawa Tengah”. Kita ketahui bahwa skripsi merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan studi sarjana strata-1 di UIN Walisongo Semarang yang berbentuk karya ilmiah.

Penulis tentunya sebagai mahasiswa setelah 5 (Lima) tahun lamanya menempuh studi di jurusan Ilmu Politik masih banyak keterbatasan keilmuan yang dimiliki, sehingga dalam proses penyusunan skripsi ini masih alakadarnya dan jauh dari kata sempurna. Harapan kecil penulis tentunya skripsi ini mampu membuka cara pandang baru dalam melihan realitas sosial dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada gaya hidup masyarakat dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua *amin allahumma amin*.

Skripsi ini dibuat oleh penulis dengan semangat dan alhamdulillah mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materiil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Nur Syamsudin, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang dan pembimbing penulis, yang selalu memberikan banyak masukan, mendukung dan mengingatkan untuk terus semangat dalam mengerjakan skripsi.
4. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang berbagai ilmu pengetahuan baru sampai penulis menyelesaikan Program Studi Sarjana Sosiologi.

5. Seluruh staf dan tendik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang banyak membantu dalam proses keadministrasian selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Kepada kedua orang tua saya dan segenap keluarga yang telah memberikan segala hal untuk penyelesaian studi ini.
7. Sahabat-sahabati, sedulur, rekan dan kolega organisasi di dalam ataupun di luar kampus yang secara tidak langsung memberikan pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa untuk penulis.
8. DPW PPP Jateng, khususnya bapak Masruhan Samsurie, bapak Suyono, dan bapak Istajib, yang telah bersedia membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. PW GMPI Jateng, khususnya mas Nurul Furqon dan Mas Farid Masduqi, yang telah bersedia membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan rasa semangat dan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Atas segala kebaikan tersebut, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum pada kata sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan kebaikan dan manfaat bagi para pembaca dan penelitian selanjutnya. *Amiin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* atas izin Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Penulis juga mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah peduli, sabar dan ikhlas, serta senantiasa memberikan perhatian dan dukungannya kepada penulis, dan tentunya doa-doa dan nasihat-nasihat kepada penulis dalam meraih impian dan menjalani kehidupan. Oleh karenanya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Saiful Nur Wahid dan Lilik Wahidah, yang penulis cintai dan banggakan. Serta kepada kakak dan adik, Yuli Fathiatur Rohmah dan Arief Rahman Hakim, yang selalu memberikan dukungan moral dan materi.
2. Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.Ag. selaku pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan waktunya untuk menyumbangkan gagasan dalam penyusunan skripsi dengan sabar dan pengertian.
3. Mahasiswi dengan NIM 1804046088 yang selalu memberi dukungan dan menemani dalam penulisan skripsi ini.
4. DPW PPP Jateng, khususnya bapak Masruhan Samsurie, bapak Suyono, dan bapak Istajib, yang telah bersedia membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. PW GMPI Jateng, khususnya mas Nurul Furqon dan Mas Farid Masduqi, yang telah bersedia membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Orang tua dari dek Za yang telah memberikan dukungan, pelajaran, dan pengalaman yang sungguh berarti bagi penulis.
7. Ahmad Baedowi, Alfin Ikhyaul U, Abdulloh Fadlana, M. Apriyanto, M. Fahim Masruh, Reza Junaidi, Kamaludin Firdaus, Wawan Andriawan yang telah memberikan dukungan, pelajaran, dan pengalaman yang sungguh berarti bagi penulis.
8. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan rasa semangat dan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

MOTTO

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S Al-Mujadalah: 11)

“Power tends to corrup, and absolute power corrupt absolutely”

(Lord Acton)

ABSTRAK

Generasi Muda Pembangunan Indonesia, sebagai organisasi sayap yang terafiliasi dengan Partai Persatuan Pembangunan, merupakan sebuah organisasi independen yang memiliki hubungan secara formal dengan Partai Persatuan Pembangunan. Karakteristik pola hubungan ini dapat dilihat dari pola relasinya. Melihat adanya hal tersebut, penelitian ini diharapkan bisa mengetahui secara mendalam bagaimana pola relasi antara PW GMPI Jateng dengan DPW PPP Jateng, serta mengetahui dinamika dan penyelesaiannya dalam relasi antara PW GMPI dan DPW PPP Jateng.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penulis juga menggunakan teori relasi partai politik dan organisasi kolateral, untuk memandu menemukan fakta-fakta pola hubungan antara Generasi Muda Pembangunan Indonesia Jawa Tengah dengan Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola relasi yang terjalin antara GMPI dan PPP Jateng memiliki dinamika komunikasi yang relatif efektif namun masih memiliki beberapa tantangan, proses pengambilan keputusan selalu melibatkan unsur GMPI, kaderisasi yang dilakukan DPW PPP terhadap PW GMPI Jateng berjalan baik dengan memberikan model kaderisasi secara formal dan non formal, serta distribusi kader GMPI dapat terakomodir oleh DPW PPP Jateng. Fakta lapangan yang peneliti dapatkan berupa berbagai masalah yang dapat terselesaikan dengan baik menjadi bukti bahwa hubungan antara organisasi kolateral yang terafiliasi dengan partai politik (induknya) memiliki intensitas masalah yang rendah, atau setiap masalah bisa terselesaikan dengan baik.

Kata Kunci : Organisasi Kolateral, Generasi Muda Pembangunan Indonesia, Dinamika Relasi.

ABSTRACT

Generasi Muda Pembangunan Indonesia, as a collateral organization affiliated with Partai Persatuan Pembangunan, is an independent organisation that has formal relationship whit Partai Persatuan Pembangunan. The characteristics of this relationship pattern can be seen from the relationship pattern. Seeing this, this research is expected to find out the dynamics and problem solving in the relationship between Generasi Muda Pembangunan Indonesia and Partai Persatuan Pembangunan in Central Java.

This research uses qualitative research methods, with a descriptive approach. data collection in this study used observation, interview, and documentation techniques. While the data analysis used in this study uses analysis through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The author also uses Thomas Poguntke's theory of political party relations and collateral organisation, to guide the facts of the relationship pattern between PW GMPI and DPW PPP Central Java.

The results of this study indicate that the relationship pattern established between PW GMPI and DPW PPP Central Java has a relatively effective communicatoin pattern, the decision-making process always involves PW GMPI elements, regeneration carried outby DPW PPP toward PW GMPI goes well, and the distribution of GMPI cadres can be accomodate by DPW PPP Central Java. Then the dynamics that occur cannot be separated from the pattern of relationship between PW GMPI and DPW PPP Central Java, where there is communication, participation, and regeneration. The field facts that researchers get in the form of various problems that can be resolved properly are evidence that are relationship between collateral organisations affiliated with political parties (their parents) has a low intensity of problems, or every problem can be resolved properly.

Keywords: Collateral Organisation, Generasi Muda Pembangunan Indonesia, Relationship Dynamics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
SKRIPSI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	6
BAB II: TEORI ORGANISASI KOLATERAL.....	10
A. Definisi, peran dan fungsi	10
B. Tipe dan Pola Hubungan.....	12
BAB III: GAMBARAN UMUM.....	16
A. Profil GMPI Jateng	16
B. Struktur Organisasi	18
C. Visi-Misi	24
D. Program Kerja.....	25
BAB IV: POLA RELASI PW GMPI DAN DPW PPP JATENG.....	33
A. Pola Komunikasi	33
B. Pola Partisipasi.....	37
C. Pola Kaderisasi.....	42
BAB V: DINAMIKA DAN PENYELESAIANNYA DALAM RELASI ANTARA PW GMPI DAN DPW PPP JAWA TENGAH	51
A. Dinamika Relasi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Penyelesaian Dinamika Relasi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VI.....	61

C. Simpulan	61
D. Saran	61
E. Penutup	62
Daftar Pustaka.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
Biodata	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan subyek yang menentukan dalam sistem politik, sehingga dalam konsekuensinya, partai politik dituntut untuk mampu menjalankan aktivitas dan fungsinya untuk tetap bergeraknya sistem politik di sebuah Negara. Hal ini mengingat partai politik lah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Partai politik dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, merupakan hal yang tidak mungkin bagi partai politik untuk melaksanakan sendiri tujuan dan fungsinya (Ristawati & Salman, 2019). Selain organisasional internal partai politik, diperlukan elemen-elemen yang membantu fungsi dan tujuan partai politik. Landasan hukum Organisasi sayap partai politik diatur dalam pasal 12 UU no 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 12 huruf j UU Partai Politik memberikan ruang lingkup bahwa organisasi sayap partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik. Organisasi sayap partai di Indonesia menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah didirikan oleh partai politik atau organisasi sayap tersebut telah ada dan menyatakan diri sebagai sayap partai politik.

Pendirian dan/atau pernyataan diri sebagai sayap partai politik tersebut disebutkan dalam AD dan ART partai politik. Organisasi sayap merupakan organisasi yang dianggap penting keberadaannya untuk menunjang eksistensi partai sekaligus menjalankan tugas dan fungsi partai yang menaunginya. Partai politik memerlukan organisasi sayap partai dalam menunjang fungsi dan tujuannya, sementara organisasi sayap partai eksistensinya tergantung dari partai politik. Tidak hanya berkontribusi dalam pencapaian suara kemenangan kader dari parpol yang diusung dalam pemilihan anggota dewan, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden, tetapi secara umum, organisasi sayap partai juga berkontribusi dalam gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan dan aktivitas-aktivitas

lainnya.

Organisasi sayap partai diidentifikasi sebagai kelompok berkepentingan. Secara keorganisasian politik, partai politik dan organisasi sayap mempunyai kesamaan. Setidaknya terdapat tiga kesamaan antara partai politik dan organisasi sayap politik, yang pertama bahwa keduanya adalah organisasi diluar sektor privat dan sektor public, berikutnya keduanya dipersepsikan mencari dukungan politik untuk konstituen maupun sebuah alasan, sedang yang ketiga partai politik dan organisasi sayap, secara umum menyelenggarakan urusan oranisasional dalam hal memobilisasi dukungan dan anggota, mencari simpati dan pengaruh politik untuk kepentingan pemilihan, dan sebagaimana organisasi, keduanya berkepentingan menjaga keberlangsungan hidup organisasi.

Generasi Muda Pembangunan Indonesia, sebagai organisasi sayap yang terafiliasi dengan Partai Persatuan Pembangunan, merupakan sebuah organisasi independen yang memiliki hubungan secara formal dengan Partai Persatuan Pembangunan. Karakteristik pola hubungan ini dapat dilihat dari pola relasinya, hak keanggotaan dalam partai, tumpang tindih kedudukan dalam organisasi, tingkat otonomi, dan pengaruhnya bagi partai politik. Hubungan antara organisasi kepemudaan dan partai politik dalam kerangka organisasi kolateral terafiliasi bersifat formal dan berunsur kepentingan internal. Hubungan semacam ini menjadi sebuah alasan organisasi kolateral memiliki otonomi yang rendah, karena pengaruh partai politik yang cukup tinggi. Anggota dari organisasi kolateral dibebaskan untuk memilih menjadi kader partai atau tidak. Hak keanggotaannya dalam partai bersifat individual. Sebagaimana dimaksud oleh Poguntke (2006), pola hubungan antara organisasi kolateral dengan partai politik ada dua, formal dan informal. Penciptaan organisasi ini dengan maksud untuk mendapatkan segmen pemilih yang cukup besar dengan kepentingan sosial ekonomi tertentu dan preferensi politik yang cukup homogen. Strategi organisasi kelompok sasaran semacam ini berupaya menciptakan forum organisasi untuk kepentingan potensial tersebut.

Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) sebagai sayap dari PPP berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan kepemudaan. Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) sebagai organisasi sayap yang terafiliasi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan organisasi kolateral yang sifatnya memiliki hubungan secara formal dengan Partai Persatuan Pembangunan. GMPI memiliki berbagai fungsi, seperti penyalur

aspirasi kepada partai maupun lembaga pemerintahan, membina dan mengembangkan kesadaran politik di kalangan generasi muda melalui pendidikan dan kaderisasi politik, sampai berusaha membina untuk perkembangan demokrasi yang islami.

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan tujuannya sebagai organisasi kolateral yang terafiliasi dengan PPP, PW GMPI Jateng juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memperlebar eksistensi PPP Jateng. Seperti pendidikan politik, kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap tahun untuk memberi pengetahuan kepada anggota dan masyarakat secara umum. Kemudian membuka ruang diskusi ilmiah yang ditujukan bagi pelajar/mahasiswa untuk belajar tentang politik. Keberadaan PW GMPI Jateng lebih merepresentasikan pada kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Dalam berbagai aspek bidang kehidupan, DPW PPP Jateng tidak dapat mengandalkan sendiri organisasinya untuk menggali aspirasi langsung, GMPI dalam hal ini muncul sebagai organisasi yang mendeterminasi kepentingan kelompok-kelompok yang ada dalam level-level yang berbeda di masyarakat, menyalurkan dan memengkompromikan kepentingan-kepentingan yang berbeda di masyarakat, interaksi dan mengkomunikasikan visi PPP, sehingga PPP tetap mendapat kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan AD/ART Generasi Muda Pembangunan Indonesia (2021) Organisasi yang lahir pada tahun 1993 ini memiliki tujuan membina dan mengembangkan generasi Muda Indonesia menjadi generasi pemimpin yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki semangat persatuan dan kesatuan dan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. PW GMPI Jawa Tengah, sebagai salah satu dari 34 wilayah di Indonesia, memiliki 17 cabang se-Jawa Tengah (Nurseha, 2022). Wilayah pesisir utara (pantura) ada 8 cabang, kota Semarang, kota Pekalongan, kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, kabupaten Pemalang, kabupaten Jepara, kabupaten Kendal dan kabupaten Brebes. Wilayah selatan ada 9 cabang, kota Surakarta, kota Salatiga, kabupaten Blora, kabupaten Semarang, kabupaten Purbalingga, kabupaten Wonosobo, kabupaten Temanggung dan kabupaten Purworejo. Generasi Muda Pembangunan Indonesia di Jawa Tengah memiliki 8761 anggota serta pengurus cabang dan wilayah, sekitar 500 per cabang, se-Jawa Tengah (wawancara, 2023).

Adanya keterikatan hubungan dalam proses politik antara PW GMPI dengan DPW PPP Jateng pasti memberi dinamika. Rekrutmen kader GMPI dalam pengurus PPP, bakal

caleg yang tidak terakomodir, tumpang tindih atau *overlapping* jabatan adalah salah satu contoh dinamika yang ada. Jawaban atas dinamika yang terjadi yaitu melalui negosiasi dan proses politik seperti pelibatan PW GMPI dalam proses-proses pengambilan keputusan di partai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Pengurus Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia di Jawa Tengah tentang pola hubungannya sebagai organisasi kolateral dengan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah, dan dinamika yang terjadi diantaranya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika relasi antara PW GMPI dengan DPW PPP Jawa Tengah?
2. Bagaimana penyelesaian dinamika relasi PW GMPI dengan DPW PPP Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dinamika relasi antara Pengurus Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia dengan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui penyelesaian masalah yang terjadi dalam relasi antara Pengurus Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan penulis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberi informasi tentang pola relasi organisasi kolateral dengan partai politik, PW GMPI dengan DPW PPP Jateng, serta gambaran terkait dinamika yang ada di dalamnya.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, juga pengetahuan yang berkaitan dengan organisasi sayap Generasi Muda Pembangunan Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa referensi dalam penelitian ini yang nantinya akan menjadi acuan dalam tinjauan pustaka. Hal ini dilakukan agar terhindar dari adanya plagiasi, mengembangkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, dan sebagai komparasi penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelitian tentang organisasi sayap partai politik sudah dilakukan oleh banyak peneliti, diantaranya Iswari (2019), Ariyadi (2021), Rengganis, multahibun & Sarip (2020), Rido (2019), Ashari (2015), dan Purnamasari (2022).

Iswari (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Arti Penting Organisasi Sayap Partai Politik Serta Hubungannya Dengan Partai Politik Di Indonesia* membahas tentang Organisasi sayap partai politik yang menjadi bagian dari kelembagaan parpol sehingga memiliki peran yang hampir sama dalam menjalankan fungsi partai politik. Organisasi sayap partai politik memiliki porsi peran yang relatif besar bagi Parpol terutama dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai seperti dalam mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Ariyadi (2021) dalam skripsinya yang berjudul *Peran Organisasi Sayap Partai Politik Angkatan Muda Partai Golkar dalam Perekrutan Kader Partai Golkar di Kota Banjarmasin* membahas pelbagai peran organisasi sayap partai politik, AMPG, dalam upaya perekrutan kader muda untuk partai Golkar.

Berbeda dengan Rengganis, Multahibun, & Sarip (2020) dalam jurnalnya yang berjudul *Sayap Partai Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi Desa*. Mengkaji gerakan sayap partai politik terhadap pengkebirian demokrasi desa. Gerakan organisasi sayap politik di desa merupakan problematika yang dihadapi oleh partai-partai politik termasuk pengaturannya. Ashari (2015) dalam skripsinya yang berjudul *Relasi Partai Politik dan Organisasi Kolateral : Studi Kasus Partai Golkar dan KOSGORO di Era Post-Soeharto* mengeksplorasi relasi Golkar dengan ormas-ormas pendukungnya seperti KOSGORO.

Penelitian ini membedah relasi partai politik dengan organisasi kolateral. Terdapat beberapa temuan, seperti, adanya pergeseran karakteristik relasi Partai Golkar dengan KOSGORO 1957 dibandingkan dengan era Soeharto. Lalu Rido (2019) dalam jurnalnya yang berjudul *Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik Dengan Partai Politik Di Indonesia* membahas tentang komparasi antara hubungan organisasi sayap partai politik dengan partai politik di luar negeri, Inggris dan Rumania, dengan organisasi sayap partai di Indonesia. Purnamasari (2022) dalam jurnalnya yang berjudul *Eksistensi, Peran, Dan Pertanggungjawaban Hukum Sayap Partai Politik Kepada Partai Politik* membahas tentang posisi organisasi sayap partai politik, peran, dan pertanggungjawabannya kepada partai politik. Partai politik membentuk secara bebas organisasi sayap partai politik untuk kepentingan partai politik itu sendiri, sehingga tidak memungkinkan organisasi sayap partai politik menjadi organisasi yang independen dan terbebas dari pengaruh atau intervensi partai politik sebagai induk dari organisasi sayap partai politik.

Perbedaan kajian pustaka dalam penelitian ini terletak pada bahasan mengenai relasi dan dinamika organisasi kolateral yang menjadi obyek penelitian. Menjadi wajar jika penelitian ini banyak memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, karena kesamaan tema kajian secara umum. Maka dari itu penelitian saya juga mengembangkan dan melanjutkan kajian pustaka yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Bagian penting yang menjadi salah satu cara membuat penelitian adalah menyusun rencana mengenai penelitian yang dilakukan. Jenis dan pendekatan penelitian memperlihatkan bagaimana langkah-langkah penelitian dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2014), dalam pendekatan kualitatif, khususnya di bidang ilmu politik, desain penelitiannya adalah desain studi kasus.

Sedangkan tipe penelitian bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan pola hubungan organisasi kolateral dengan partai politik. Untuk itulah peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena relatif cocok dengan permasalahan yang sedang peneliti tulis. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai

pola hubungan antara PW GMPI dengan DPW PPP Jawa Tengah beserta dinamika di dalamnya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berarti sumber data yang langsung peneliti dapat dari lapangan dan informasi pokok yang wajib didapatkan. Hal ini berarti data yang didapat langsung dari tempat penelitian, diperoleh melalui pengamatan, atau wawancara. Dalam hal penelitian ini yakni pengurus dan/atau anggota Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah, dan pengurus/anggota GMPI Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian pustaka ataupun informasi pendukung lain yang bisa diperoleh dari buku, dokumen atau data-data lain yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu meliputi hasil penelitian bagaimana perilaku dan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi peneliti. Informasi ini nantinya digunakan untuk menunjang data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, meliputi empat jenis strategi yaitu observasi, wawancara, studi dokumen, serta materi audio dan visual. Demikian pula halnya dengan penelitian ini, metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti akan melaksanakan wawancara langsung terhadap narasumber yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Wawancara ini dilakukan antara peneliti dengan informan yang dilakukan secara langsung kemudian mengajukan berbagai persoalan ataupun mendiskusikan suatu yang menjadi permasalahan penelitian. Informan selanjutnya membagikan jawaban ataupun reaksi yang cocok dengan pendapatnya masing-masing. Metode ini dikenal sebagai wawancara mendalam yaitu proses mendapatkan penjelasan secara mendalam untuk tujuan penelitian dengan menggunakan metode tanya jawab ataupun dengan berdiskusi tatap muka

antara pewawancara dan narasumber, dengan ataupun tanpa memakai pedoman (*guide*) wawancara.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data pendukung dalam penelitian, metode ini juga dilakukan melalui studi dokumen atau yang berasal dari data sekunder sebagai sumber data tertulis, dengan cara menganalisis beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan tema penelitian serupa.

c. Observasi

Metode ini digunakan untuk menghimpun informasi melalui pengamatan serta pengindraan. Tujuan dilakukannya observasi guna memperoleh gambaran secara jelas tentang suatu indikasi sosial ataupun kejadian tertentu yang terdapat dan terjadi pada suatu lokasi dalam suatu wilayah.

4. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang peneliti gunakan adalah metode analisis data kualitatif, dimana data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif interaktif. Model ini terdiri dari 3 komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. (Creswell, 2014).

Reduksi data adalah tahapan eliminasi data-data yang kurang berkaitan dengan penelitian. Hal ini ditujukan agar hasil penelitian lebih terfokus serta mempunyai batas yang jelas. Tahapan ini dilakukan sejak awal penelitian saat peneliti telah mendapatkan informasi sampai hasil penelitian terakumulasi secara total.

Berikutnya setelah data diakumulasi lebih lanjut, disajikan dalam wujud narasi yang memungkinkan bisa dilakukan simpulan penelitian. Dimana narasi yang disusun dan dipertimbangkan dengan permasalahannya. Penyajian data tersebut meliputi narasi kalimat, skema, jaringan kerja ataupun table pendukung bila dibutuhkan. Pada tahapan penyajian data, peneliti akan mengelompokkan data sumber pada kelompok informan, sehingga diketahui sebagian data dari narasumber berasal pada pokok permasalahan serta sumbernya.

Data yang sudah terkumpul, selanjutnya peneliti bisa menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan serta verifikasi ini dilakukan dengan kegiatan pengulangan (*review*) dengan tujuan untuk pemantapan informasi, setelah itu penelusuran data kembali secara cepat untuk meninjau apabila dimungkinkan terdapatnya akibat kedua yang timbul pada waktu menulis sajian data, dengan meninjau ulang pada catatan lapangan, berdiskusi baik dengan rekan mahasiswa, dosen pembimbing ataupun acuan yang lain untuk meningkatkan objektivitas data penelitian.

BAB II

TEORI ORGANISASI KOLATERAL

A. Definisi, peran dan fungsi

Organisasi kolateral merupakan istilah yang belum begitu familiar dalam studi ilmu politik. Istilah tersebut biasa digunakan dalam literatur kajian ilmu ekonomi yang kemudian diserap menjadi istilah dalam kajian ilmu politik (Zulfa, 2014). Di Indonesia, organisasi kolateral seringkali disebut sebagai organisasi sayap, *underbow*, badan otonom, dan sebagainya. Organisasi kolateral bagi partai politik berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan jangkauan pada pemilih, terlebih di luar basis pemilihnya.

Organisasi sayap partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk atau dimiliki oleh partai politik untuk membantu kinerja dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Sesuai dengan aturannya, UU Partai Politik yaitu UU No.2 Tahun 2008 Pasal 12 huruf (j) menyatakan bahwa salah satu dari hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik.

Organisasi sayap partai politik biasanya berupa organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, organisasi tani, organisasi buruh, organisasi profesi, dan organisasi-organisasi rakyat sesungguhnya merupakan sumber daya yang harus dibina dalam sebuah organisasi sayap atau *underbow* partai, kemudian dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan yang sebesar-besarnya dari segenap lapisan masyarakat, yang nantinya mampu memberi kemenangan bagi partai dalam kompetisi politik secara elegan dan bermartabat (Nabilah, 2015). Kenyataannya, organisasi sayap atau *underbow* partai politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap memberikan kontribusi yang besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai dalam pengembangan kualitas kehidupan demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Organisasi kolateral yang terafiliasi dengan partai mempunyai tipe kedekatan hubungan yang tidak rentan, juga tidak terlalu kuat. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu, pola relasinya, hak keanggotaan dalam partai, tumpang tindih kedudukan dalam organisasi, tingkat otonomi,

dan pengaruhnya bagi partai politik. Ada dua faktor yang menjadi alasan berdirinya sebuah organisasi, yaitu faktor ideologis dan kesempatan (opportunity). Pada sisi ideologis, organisasi digunakan sebagai upaya perbaikan dalam sebuah sistem politik, misal memperkuat ideologi atau membuat ideologi sebagai alat untuk memperjuangkan kebijakan yang baik menurut organisasinya. Akan tetapi sisi ideologis ini akan sangat jarang tidak dibersamai dengan adanya alasan oportunistik yaitu menaikkan karir politik diri dan kawan-kawan dalam organisasi tersebut (Kulsum, 2015).

Organisasi sayap partai memiliki peran dan fungsi yang sangat berarti bagi partai politik dalam upaya sosialisasi, implementasi dan diseminasi kebijakan dan program partai untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi. Dukungan dan simpati dari masyarakat terhadap partai harusnya direspon dan dikelola dengan serius dan baik, karena dukungan dan simpati dari masyarakat adalah faktor yang menentukan keberhasilan partai dalam menjemput kemenangan, disamping faktor lainnya, seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kualitas sumber daya manusia, kejelasan visi, misi dan platform, serta profesionalitas dan integritas kader dan pimpinan partai.

Membuat kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian, peringatan hari-hari besar Islam, pelatihan dai dan daiyah, pelatihan manajemen dakwah, bimbingan dan penyuluhan rohani, bakti sosial dan kesehatan, pelatihan kewirausahaan di pondok-pondok pesantren, pelatihan keterampilan, bantuan kepada daerah yang terkena bencana, pemberian beasiswa, buka puasa bersama, terawih keliling, bazar sembako murah, pelatihan penggemukan sapi bagi santri pondok pesantren, dialog keagamaan., training menjahit dan lain-lain juga berfungsi untuk menjaga loyalitas kader dan simpatisan dari organisasi sayap maupun partai politik (Asroni, Yusup, & Sofia, 2013). Hal ini juga memberi dampak positif bagi parpol melalui pergerakan organisasi sayapnya, seperti memperkirakan kekuatan partai dari segi perkembangan jumlah simpatisan hingga menjaga citra baik partai politik.

Selain itu organisasi sayap juga terbilang memiliki peran yang besar dalam proses kaderisasi dan rekrutmen partai politik, seperti yang terjadi saat ini, hubungan partai politik dengan organisasi sayap dapat diibaratkan seperti simbiosis mutualisme (satu sama lain saling menguntungkan). Organisasi sayap menjadi lahan untuk mendapatkan dukungan politik, bagi partai politik dalam menjelang pemilu. Bahkan, jika segan

mencari dukungan dari organisasi masyarakat tertentu, partai politik sering membuat organisasi sayap baru. Begitu juga dengan keberadaan partai politik yang tak dapat dipisahkan dengan sistem demokrasi, bahkan menjadi syarat utama mewujudkan sistem tersebut. Melalui partai politik kebijakan dibuat dengan mekanisme proses pembuatan produk perundang-undangan. Sehingga keberadaan organisasi sayap sangat dibutuhkan guna mengevaluasi dan mengontrol kinerja partai politik yang berada di legislatif, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal ini dilakukan dengan peran kader organisasi sayap yang menjadi politisi partai politik tertentu. Sementara pengawasan eksternal dilakukan dengan kegiatan pengawalan melalui *public hearing*, demonstrasi dan kritikan melalui media massa (Fahmi, 2014).

B. Tipe dan Pola Hubungan

Teori organisasi kolateral mampu menentukan tipe dan pola hubungan suatu organisasi sayap dengan partai politik (Poguntke, 2006). Dimana ada empat jenis organisasi kolateral. Pertama, bersifat independen. Organisasi ini tidak memiliki keterikatan secara formal dengan partai politik maupun kubu politik. Hal ini yang menyebabkan organisasi kolateral yang bersifat independen memiliki otoritas penuh atas kehendaknya. Organisasi ini lebih memperhatikan pola hubungan yang bersifat negosiatif, karena partai tetap membutuhkannya dalam bentuk dukungan, dan organisasi membutuhkannya dalam bentuk yang lain. Sebab partai tahu bahwa dukungan organisasi semacam ini bisa ditarik kapan saja, tanpa perubahan formal dalam hubungan keduanya.

Kedua, organisasi kolateral korporat. Organisasi ini memiliki potensi yang cukup besar. Organisasi ini melibatkan keanggotaan secara kolektif partai politik, sehingga dapat dengan mudah untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di partai politik.

Ketiga, organisasi kolateral yang berafiliasi pada partai politik, merupakan organisasi yang mewakili fungsi serta strategi partai politik. Organisasi yang berafiliasi pada partai politik ini, secara teknis, bersifat independen. Organisasi ini merupakan suborganisasi klasik yang dibuat oleh partai politik.

Keempat, *ancillary organization* atau organisasi tambahan/pelengkap, yang tidak begitu jauh berbeda dengan organisasi kolateral yang terafiliasi dengan partai politik.

Keduanaya mendiversifikasikan diri guna menarik minat kalangan yang lebih luas, misalnya pemuda, buruh, wanita, dan lain sebagainya.

Di dalam hubungan secara organisasional, bentuk keterhubungan atau ikatan antara organisasi sayap dengan partai politik bersifat formal dan informal. Formal dalam artian elit organisasi sayap telah menjamin adanya akses permanen ke badan-badan pembuat keputusan partai (atau sebaliknya) dimana hak akses dan partisipasi tersebut diatur dalam partai. Dari segi relasi, Poguntke menyebut bahwa hubungan yang berdasarkan ikatan organisasi formal lebih stabil dan efektif, juga tahan lama daripada hubungan yang hanya melalui ikatan informal, dan inilah yang membuat ikatan formal menjadi sangat berharga bagi elit politik partai. Sedangkan ikatan informal dalam artian hubungan yang didasarkan pada reaksi terhadap tekanan yang diterapkan dalam negosiasi semi permanen oleh elit organisasi. Elit organisasi tidak dapat menjamin akses ke pembuat keputusan partai namun dapat memobilisasi pemilih untuk memberikan suara atau tidak memberikan suara terhadap suatu partai tergantung pada dipenuhi atau tidaknya tuntutan kebijakan tertentu. Namun, keefektifan hubungan antara partai politik dan organisasi sayap akan tergantung pada sifat lingkungan organisasi yang terhubung dengan elit partai, baik melalui ikatan informal atau formal.

Hubungan antara organisasi kemasyarakatan dan partai politik dalam kerangka organisasi kolateral terafiliasi partai politik biasanya bersifat formal. Ditinjau dari keanggotaan, anggota organisasi kolateral terafiliasi partai biasanya juga menjadi anggota, bahkan pengurus, dari partai politik. Keterlibatan anggota organisasi kolateral terafiliasi partai dalam keanggotaan maupun kepengurusan partai politik membuat kemungkinan terjadinya tumpang tindih keanggotaan maupun kepengurusan. Organisasi kolateral terafiliasi mendapat kontrol yang tinggi dari partai politik. Hal ini menyebabkan otonomi organisasi kolateral terafiliasi rendah.

Berikut adalah tabel yang dibuat Thomas Poguntke dalam menjelaskan empat jenis organisasi kolateral partai politik:

Tabel 2.1

Jenis Organisasi	Organisasi Kolateral Independen	Organisasi Kolateral Korporat	Organisasi Kolateral Afiliasi	Organisasi Kolateral Pendukung
Jenis Keanggotaan	Keanggotaan Individual Opsional	Keanggotaan Kolektif (Individual opsional)	Keanggotaan individual	Keanggotaan parsial
Tumpang Tindih Keanggotaan	Parsial	Parsial	Parsial	Total
Hak Keanggotaan	Individual	Kolektif	Individual	Individual
Jenis Hubungan	Informal	Formal	Formal	Formal
Kontrol oleh Partai	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi
Pengaruh Organisasi Kolateral	Bervariasi	Tinggi ke sangat tinggi	Bervariasi	Bervariasi
Jenis Kepentingan Yang Paling Sering Muncul	Eksternal		Internal	

Hubungan organisasi kolateral dan partai politik biasanya mencapai titik intensitas tertinggi keharmonisannya ketika menjelang pesta demokrasi. Organisasi kolateral menjadi sumber basis massa bagi partai politik dan partai politik menjadi jalur promosi di bidang politik bagi para anggota kelompok kolateral (Sasmarta, 2007). Sedangkan setelah hajatan tersebut, organisasi kolateral akan terlibat dalam dinamika internal partai

yang bisa semakin mengharmoniskan atau malah bisa merenggangkan hubungan keduanya.

Keharmonisan yang tidak stabil dalam hubungan antara organisasi kolateral dan partai politik merupakan hal yang wajar karena kedekatan keduanya bergantung pada kepentingan yang tidak menentu. Selain Pemilu, hubungan organisasi kolateral dan partai politik juga akan meningkat intensitasnya pada suksesi kepemimpinan partai (Baskoro, 2014). Organisasi kolateral akan berusaha agar elit partai yang mempunyai kedekatan dengan organisasinya mendapatkan kedudukan strategis di dalam partai. Posisi strategis yang diperebutkan adalah jabatan Ketua Umum. Bila Ketua Umum partai mempunyai relasi yang baik dengan organisasi kolateral maka anggota organisasi kolateral tersebut kemungkinan besar bisa dimasukkan dalam kepengurusan partai. Apabila tidak dimasukkan dalam struktur partai, setidaknya organisasi kolateral tersebut lebih mudah mengakses info, dana, dan lain sebagainya dari partai politik.

BAB III

Generasi Muda Pembangunan Indonesia Jawa Tengah

A. Profil GMPI Jateng

Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) merupakan salah satu dari empat organisasi sayap (banom) Partai Persatuan Pembangunan. GMPI Jawa Tengah terbentuk pada tanggal 15 Oktober 1995, selisih dua tahun dengan terbentuknya GMPI. Proses kelahiran GMPI Jateng tak lepas dari inisiasi empat pemuda Partai Persatuan Pembangunan, Endro Suyitno, Masruhan Samsurie, Istajib, dan Gunarto Muhsin. Atas dasar inisiasi terbentuknya GMPI Jateng tersebut, Endro Suyitno ditunjuk sebagai ketua dan Gunarti sebagai sekretaris. Setelah proses panjang pembentukan dan pematapan kesiapan organisasi sayap tingkat wilayah, dilaksanakan musyawarah wilayah pertama pada tahun 2000.

Sejak berdiri tahun 1995 sampai sekarang, GMPI Jateng telah berganti kepengurusan lima kali. Dalam perjalanannya, sempat terjadi vakum selama 10 tahun (2011-2020). Hal ini yang membuat GMPI Jateng menata ulang organisasi secara total. GMPI Jawa Tengah sekarang sudah membawahi 17 cabang, diantaranya, kota Semarang, kota Pekalongan, kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, kabupaten Pemalang, kabupaten Jepara, kabupaten Kendal, kabupaten Brebes, kota Surakarta, kota Salatiga, kabupaten Blora, kabupaten Semarang, kabupaten Purbalingga, kabupaten Wonosobo, kabupaten Temanggung dan kabupaten Purworejo. Generasi Muda Pembangunan Indonesia di Jawa Tengah memiliki 8761 anggota serta pengurus cabang dan wilayah, sekitar 500 per cabang, se-Jawa Tengah.

Generasi Muda Pembangunan Indonesia, sebagai organisasi sayap yang terafiliasi dengan Partai Persatuan Pembangunan, merupakan sebuah organisasi independen yang memiliki hubungan secara formal dengan Partai Persatuan Pembangunan. Karakteristik pola hubungan ini dapat dilihat dari pola relasinya, hak keanggotaan dalam partai, tumpang tindih kedudukan dalam organisasi, tingkat otonomi, dan pengaruhnya bagi partai politik.

Secara relasi, GMPI merupakan badan otonom atau kepanjangan tangan dari Partai Persatuan Pembangunan dalam menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Hak keanggotaan GMPI dalam PPP bersifat individual, yakni hak anggota partai

diberikan secara individu pada anggota, tanpa melihat keanggotaan secara kolektif. Tingkat otonomi dan pengaruh untuk partai rendah, karena GMPI sebagai banom yang mau tidak mau harus sejalan dengan PPP, atau dalam kata lain, sangat sulit untuk membuat keputusan yang bersebrangan dengan partai.

GMPI Jateng juga memiliki berbagai pandangan serta sikap politik atas berbagai persoalan di Jawa Tengah. Pandangan serta sikap politik GMPI Jateng terhadap berbagai problematika yang ada di Jawa Tengah variatif, mulai dari memberi kritik atas berbagai kebijakan publik, sampai memberi pernyataan sikap atas tindakan yang tidak menyenangkan dari pejabat negara. Sikap untuk kembali pada logo PPP, GMPI Jateng secara tegas menyampaikan pada saat Musyawarah Wilayah IV yang juga dihadiri oleh ketua PP GMPI.

Tabel 3.2

Ketua Generasi Muda Pembangunan Indonesia Jawa Tengah dari masa ke masa

KETUA dan Sekretaris	PERIODE
Endro Suyitno dan Gunarto Muhsin	1995-2000
Istajib A. S. dan Arif Rahman Hakim	2000-2005
Arif Rahman Hakim dan Lutfi Aris Sasongko	2005-2010
Lutfi Aris Sasongko dan Sutarjo	2010-2015
Nurul Furqon dan Farid Masduqi	2021-2025

B. Struktur Organisasi

1. Susunan Personalia

Berdasarkan surat keputusan Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (2022), susunan personalia Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI) Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 3.3

Struktur kepengurusan PW GMPI Jateng

Majelis Pertimbangan Wilayah	
Ketua	Masruhan Samsurie
Sekretaris	Suyono, SIP., M. Si
Anggota	Dr. Abdul Kholik, SH., M. Si dr. Hj. Sholeha Kurniawati inna Hadianala, SE hj. Nurul Hidayah Supriati, Msi Drs. H. istajib AS Drs. Arif Rahman Hakim Lutfi Aris Sasongko, STP., M. Si

Pimpinan Wilayah	
Ketua	H. Nurul Furqon, SE., MM
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan	Muhammadun, S. Pd.I., MM
Wakil Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi	Fahmi Hakim, SH., MM
Wakil Ketua Bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif	Nur Fasikha, Amd. Kom
Wakil Ketua Bidang Kajian Riset dan Pengembangan	Muhammad Ghozali, ST

Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM	Khaeru Sholeh, SH., MH
Wakil Ketua Bidang Media, Informasi dan Komunikasi	Muhammad Nurseha, S Kom
Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga	Ali Imron
Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Pelajar	Presti Handayani
Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan	Lilis Sugiharti, SE. Sy., MM
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana	Nur Sunari
Wakil Ketua Bidang Dakwah dan Kajian Islam	M. Sulkan, S. Ag
Wakil Ketua Bidang Sosial Politik	H. M. Hinsah Syahlani
Wakil Ketua Bidang Pengembangan Seni Budaya	Muhammad Khosim, SH
Wakil Ketua Bidang Penguatan Ideologi	Arief Budiyanto Pusposuhardjo
Wakil Ketua Bidang Industri dan Perdagangan	Balqis Fadhilah, SHI
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan	Fauzum Mahmudah
Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial	Masrifah Afna, SM
Wakil Ketua Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan	Romelan, S.Sy
Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM	Muhammad Wahib, S.Pd., M.Pd
Wakil Ketua Bidang Kreativitas dan Olah Raga	Fawwas Arif Al Jabbar, SE

Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan	Nailul Fauziyah Endrawati, SE., MM
Sekretaris	Farid Masduqi
Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan	Muhammad Chowasul Arifin
Wakil Sekretaris Bidang Pembinaan dan Aparatur Organisasi	Ahmad Salim, S. Ag
Wakil Sekretaris Bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif	Nawwarotul Jannah, S. Mat
Wakil Sekretaris Bidang Kajian Riset dan Pengembangan	Agung Prasetyo
Wakil Sekretaris Bidang Advokasi Hukum dan HAM	Muhammad Jamal, SH., MH
Wakil Sekretaris Bidang Media, Informasi dan Komunikasi	Sugeng Aristya Rohmad, SH
Wakil Sekretaris Bidang Kerjasama Antar Lembaga	Syifa' Al Karim
Wakil Sekretaris Bidang Kemahasiswaan dan Pelajar	Mujah Wirul Ilma
Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan	Nur Wakhidatul Maghfiroh, MPd
Wakil Sekretaris Bidang Penanggulangan Bencana	Tofa Arisandi, SE
Wakil Sekretaris Bidang Dakwah dan Kajian Islam	Ahmad Amrun
Wakil Sekretaris Bidang Sosial Politik	Fithriya Hasanah
Wakil Sekretaris Bidang Pengembangan Seni Budaya	Fathin Arifatul Izzah, S.Kom
Wakil Sekretaris Bidang Penguatan Ideologi	Laeli Rusdiana

Wakil Sekretaris Bidang Industri dan Perdagangan	Rebin, SHI
Wakil Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan	Khotibul Umam, S.Kom
Wakil Sekretaris Bidang Kesejahteraan Sosial	Abdul Jamil, S.Pd.I., M.Pd
Wakil Sekretaris Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan	Asmudi, SE
Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM	Andi Setiawan, S.Kom
Wakil Sekretaris Bidang Wakil Sekretaris Bidang Kreativitas dan Olah Raga	Ari Irkham Fauzi, S.Kom
Wakil Sekretaris Bidang Kesehatan dan Lingkungan	drg. Nadia Muna
Bendahara	Hj. Yaningsih, SH
Wakil Bendahara	Itsna Rahmania Ahmad, S.Pd Nissa Maulida Qurrotul Aini, B.Sc

Lembaga-Lembaga	
Lembaga Ekonomi Bisnis	
Ketua	Khabib Khozi, SH, MH
Sekretaris	Lu'luul Fuad, S.Kom
Anggota	Friska Iftiana Diana Malika Fauziyah M. Fajar Falah
Lembaga Advokasi Hukum dan HAM	

Ketua	Sulistiyanto, SH
Sekretaris	Faiqotul Inayah, SH
Anggota	Muhammad Alfian Ali Musthofa Nila Khoirun Nisa Ahmad Faris Ahkam
Lembaga Penanggulangan Bencana	
Ketua	M. Ibnu Hajar
Sekretaris	M. Khafid
Anggota	Doni Aris Haryanto, SE Dian Nur Fitriyani, S.Pd Ragil Bagus Panuntun
Lembaga Pers GMPI	
Ketua	Kharen Puja Risma
Sekretaris	Miftahul Ansor
Anggota	Lukito Sadzali Dian Ramadhanty, S. Kom
Lembaga Seni Budaya	
Ketua	Imam Kharisudin
Sekretaris	Khotibul Umam
Anggota	Cahya Ayu Ningrum, A.Md Choirul Musyafak Yudha Pratama Irfannudin
Lembaga Pengabdian Masyarakat	
Ketua	Muslikan, S. Pd., M. Pd

Sekretaris	Nova Elisa
Anggota	Nur Arofa, S. Psi Nafis Firdaus Nuzula Anis Fuad, SS
Lembaga Dakwah	
Ketua	Bakhtiar Khasbullah A., SH
Sekretaris	Abdurrozak, SH
Anggota	Ibnu Malik, S.Pd Muhammad Shovil Mubarak Saefudin Zuhri

2. Tugas dan Wewenang Pimpinan Wilayah

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Bab II Pasal 23 ayat (2) ART GMPI tentang tugas dan wewenang Pimpinan Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah
- b. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Cabang
- c. Mengusulkan nama-nama Majelis Pertimbangan Wilayah kepada Pimpinan Pusat
- d. Membentuk Biro-Biro dan lembaga khusus
- e. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pusat atas pengajuan, permohonan, pengusulan Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Cabang.
- f. Menerbitkan Surat Keputusan pengesahan Pimpinan Anak Cabang.
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam Musyawarah Wilayah dan laporan tertulis dalam Rapat Kerja Wilayah.
- h. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Fungsi Personalia

Sesuai dengan SK tentang pedoman kerja pimpinan GMPI (2021), masing-masing personalia Pimpinan Wilayah GMPI menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. Ketua, adalah penanggungjawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas internal dan eksternal organisasi yang bersitat umum pada tingkat Wilayah/Provinsi.
- b. Wakil Ketua Bidang, membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas internal dan eksternal organisasi sesuai dengan bidang kerjanya.
- c. Sekretaris, adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan kegiatan administrasi, kepastakaan, dan ketatausahaan, kesekretariatan dan hubungan organisasi dengan pihak eksternal pada tingkat Wilayah/Provinsi.
- d. Wakil Sekretaris, adalah bertugas atas nama sekretaris untuk kegiatan bidang yang bersangkutan membantu ketua bidangnya di tingkat wilayah/Provinsi.
- e. Bendahara, adalah penanggungjawab dan koordinator umum di bidang keuangan dan fasilitas serta perlengkapan organisasi pada tingkat wilayah/Provinsi.
- f. Wakil Bendahara bertugas membantu tugas-tugas Bendahara sesuai bidang kerjanya.
- g. Ketua-Wakil Ketua Biro, adalah bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja di bironya masing-masing di tingkat wilayah
- h. Anggota-anggota Biro, adalah bertugas membantu ketua bironya masing-masing dalam merealisasikan kerja-kerja dan bironya masing-masing.

C. Visi-Misi

Organisasi perlu membuat sebuah visi dalam menjalankan roda organisasi secara profesional. Hal ini diharapkan agar organisasi memiliki kejelasan dalam berjalan dalam mencapai tujuannya. Visi Generasi Muda Pembangunan Indonesia adalah membina dan mengembangkan generasi Muda Indonesia menjadi generasi pemimpin yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki semangat persatuan dan kesatuan dan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT (AD/ART Generasi Muda Pembangunan Indonesia, 2021).

Upaya dalam mendukung tercapainya visi tersebut, GMPI mempunyai beberapa misi, yaitu:

1. Membina pribadi generasi muda Indonesia untuk menjadi generasi pemimpin yang beriman dan bertaqwa.

2. Membina generasi muda Indonesia menjadi kader-kader pembangunan yang tangguh, terampil, dan mandiri sehingga bermanfaat bagi kepentingan bangsa,
3. Membina dan mengembangkan profesionalisme di bidangnya masing-masing,
4. Membina dan mengembangkan kesadaran politik di kalangan generasi muda melalui pendidikan dan kaderisasi politik yang terarah dan terencana,
5. Berperan aktif dalam berbagai upaya pembinaan dan pengembangan demokrasi yang Islami,
6. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan organisasi

D. Program Kerja

Dalam merumuskan program kerja, Generasi Muda Pembangunan Indonesia Jateng membagi program yang berbeda di setiap tahunnya. Periode 2021-2025 tahun pertama (2023), GMPI Jateng memiliki program kerja sebagai berikut:

Tabel 3.4
Program kerja PW GMPI

No	Program	Waktu	Tujuan/Target
1	RAKORWIL	Minggu pertama Januari	Merumuskan dan menetapkan program PW GMPI Jateng
2.	Konsolidasi Organisasi	Setiap awal bulan	Penataan kelembagaan PC GMPI se Jawa Tengah dengan melakukan konferensi untuk mewujudkan kepengurusan tingkat cabang yang normal dan solid
3.	Pengembangan Keswadayaan Ekonomi Pemuda/Pelatihan Kewirausahaan	Setiap pertengahan bulan	Terwujudnya kemandirian ekonomi pemuda dengan membentuk lembaga perekonomian dengan wujud koperasi pemuda atau lembaga

			lainnya.
4.	Pelatihan Jurnalistik	April 2023	Mengembangkan skil pengurus wilayah dan kader GMPI Jawa Tengah dalam bidang kepenulisan
5.	Kontrol Sosial	Mei-Desember 2023	Merespon semua masalah yang berkembang dan menyampaikan kepada pihak terkait, khususnya PPP.
6.	Festival Kopi	Juni 2023	Mengenalkan GMPI kepada masyarakat sekaligus bekerjasama dengan UMKM.
7.	Kaderisasi Tahap I: Upgrading Pengurus	Juli 2023	Meningkatkan kualitas Pengurus dan kader GMPI Jateng
8.	Kaderisasi Tahap II: Kemah Bakti Caleg Muda	Agustus 2023	Memberi bekal pada pengurus dan kader GMPI Jateng yang menjadi caleg
9.	PKM (Pelatihan Kepemimpinan Menengah)	September 2023	Meneruskan program PKN dari PP GMPI.
10.	-FGD: Membidik Pemilih Pemula -Turnamen E-Sport	Oktober 2023	Membantu PPP untuk membidik pemilih pemula di Jateng
11.	Festival Hadroh	November 2023	Mengenalkan GMPI pada kalangan muda
12.	GMPI Bersholawat dan Santunan Anak Yatim	Desember 2023	Meneruskan program tahunan GMPI bersholawat yang sudah dilaksanakan dari Tahun 2021

			sekaligus mendoakan, GMPI, PPP dan Indonesia
--	--	--	--

Proses kaderisasi dalam rangka melebarkan jangkauan terhadap generasi milenial dilakukan dengan berbagai cara oleh GMPI Jateng. Membuat kegiatan yang positif seperti perlombaan E-sport yang memiliki daya tarik cukup besar dikalangan para pemuda merupakan salah satu upaya GMPI merangkul pemuda. GMPI juga hadir dalam komunitas pemuda yang ada di Jawa Tengah, seperti pemuda pecinta kopi di Temanggung, pegiat literasi Semarang, komunitas Fotografer Kendal, dan lain sebagainya.



Gambar 3.1

GMPI Jateng memberi santunan anak yatim dalam rangka melanjutkan kegiatan PPP yang bernilai keislaman.



Gambar 3.2

Pemberian bola volly kepada komunitas pemuda olahraga di Kabupaten Semarang



Gambar 3.3

Membuat acara GMPI memotret dalam rangka mengenalkan produk lokal di Kabupaten Kendal



Gambar 3.4

Seminar kepemimpinan bersama banom PPP yang lain, mahasiswa, dan masyarakat umum.



Gambar 3.5

Mengadakan Nobar Piala Dunia



Gambar 3.6

Focus Grup Discussion bersama pelajar dan mahasiswa dalam rangka pendidikan politik membahas tentang bonus demografi dan potensi suara pemilih pemula 2024

Sebagai organisasi yang mempunyai hubungan historis, aspiratif, dan programatis dengan PPP yang dipertegas dengan sikap anggota yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada PPP, GMPI memiliki komitmen konstitusional dan kewajiban moral terhadap eksistensi, kebesaran, dan masa depan PPP. GMPI juga dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif guna mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Melalui dialog kritis dan kajian mendalam atas berbagai perkembangan internal organisasi dan dinamika lingkungan strategis; dinamika partai, kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara, GMPI memberi rekomendasi dalam berbagai aspek (Rekomendasi Mukhtamar IV GMPI, 2021). Pertama, ideologi dan politik. Mulai dari mendesak pemerintah untuk sosialisasi dan revitalisasi Pancasila, memperkuat sistem politik, reformasi birokrasi, hingga mengefektifkan implementasi otonomi daerah.

Kedua, Hukum. GMPI mendesak pemerintah untuk mempertegas penegakan hukum, komitmen memberantas korupsi, pendisiplinan aparat penegak hukum, dan pengecaman atas kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Ketiga, Ekonomi. GMPI memberi kritik pada pemerintah atas kebijakan Investasi/PMA agar memperjelas arah pengelolaannya, memberi rekomendasi agar menjamin ketersediaan ESDM dan bahan pokok, hingga desakan untuk membatasi impor dan memberikan kedaulatan untuk para petani.

Keempat, Agama. GMPI mendukung upaya pemerintah dalam rangka pembinaan kehidupan umat beragama di Indonesia, terutama kehidupan intern sesama umat beragama, kehidupan antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. GMPI juga mendesak Pemerintah untuk tidak menaikkan Ongkos Naik Haji (ONH) pada setiap tahun dan meningkatkan kualitas pelayanan Jemaah Haji di segala sektor. Dengan Pengelolaan ONH secara efisien Efektif akan menghemat biaya permasalahan yang dihadapi oleh para jemaah haji

Kelima, Sosial dan Budaya. GMPI mendesak Pemerintah, untuk mencermati dan menseleksi segala media informasi yang merusak sosial budaya masyarakat. GMPI juga menyoroti dampak kemiskinan yang menimbulkan efek sosial yang cukup besar, dimana

akan ada kesenjangan sosial hingga masyarakat Indonesia lebih memilih menjadi TKI dan TKW akibat sulitnya mendapat pekerjaan.

Keenam, Pendidikan. GMPI mendesak kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama untuk menambah jam pendidikan agama dan akhlak dan tidak melakukan perubahan kurikulum dan sistem pendidikan ketika pergantian pimpinan kementerian, Standardisasi Mutu pendidikan dan Sertifikasi, Komersialisasi Dunia Pendidikan, dan Pengawasan Dana BOS.

Ketujuh, Luar Negeri. GMPI mendesak pemerintah RI untuk memberikan andil yang positif untuk peran serta menciptakan perdamaian di wilayah Timur Tengah, terutama dalam mencegah kebiadaban pemerintahan Yahudi Israel, yang senantiasa menciptakan suasana keresahan bagi ummat Islam, terutama warga Muslim di Negara Israel sendiri, di Palestina, serta Negara-negara Timur Tengah lainnya. GMPI juga mendesak pemerintah RI untuk memberikan andil yang positif dan konkrit untuk mencegah pemerintahan Yahudi Israel yang senantiasa berusaha mengganggu eksistensi Mesjid Al-Aqsha di kota Yerussalem, yang merupakan salah satu dari tiga kota suci ummat Islam, yakni Mesjidil Haram di Makkah, Mesjidin Nabawi di kota Madinah, dan Mesjidil Aqsha di kota Yerussalem.

Mendukung kerjasama internasional dalam rangka pencitraan politik luar negeri dan memperkuat peran diplomatik Indonesia dlm melindungi WNI di luar negeri. GMPI menuntut pemerintah RI dalam hal ini Departemen Luar Negeri, agar lebih memperkokoh peran politik luar negerinya dalam melaksanakan tugas diplomasi, terutama dalam menjaga hak-hak dan eksistensi WNI ketika sedang berada di luar negeri.

BAB IV

Pola Relasi PW GMPI dan DPW PPP Jateng

Proses yang dilakukan peneliti untuk mengetahui pola relasi antara GMPI dengan PPP di Jawa Tengah, peneliti mengumpulkan data dengan cara terhadap Istajib (Wakil Ketua Bidang OKK DPW PPP Jateng), Masruhan Samsurie (Ketua DPW PPP Jateng), Suyono (Sekretaris DPW PPP Jateng), Nurul Furqon (Ketua GMPI Jateng), dan Farid Masduqi (Sekretaris GMPI Jateng). Peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PPP maupun GMPI Jateng.

Berdasarkan proses pengumpulan data, peneliti mendapatkan hasil bahwa relasi antara GMPI dan PPP Jateng memiliki pola komunikasi yang relatif efektif, proses pengambilan keputusan selalu melibatkan unsur GMPI, kaderisasi yang dilakukan PPP terhadap GMPI berjalan dengan baik, serta distribusi kader GMPI dapat terakomodir oleh PPP.

A. Pola Komunikasi

Relasi antara PW GMPI dengan DPW PPP Jawa Tengah pasti ada dinamika yang terjadi. Ada beberapa temuan dinamika yang terjadi antara PW GMPI dan DPW PPP Jateng. Selain itu, peneliti juga menggali informasi tentang penyelesaian yang bisa dilakukan untuk mengatasi dinamika yang ada. Dinamika yang terjadi tidak terlepas dari pola relasi antara PW GMPI dan DPW PPP Jateng, dimana ada komunikasi, partisipasi, dan kaderisasi.

Dinamika yang terjadi dalam komunikasi antara PW GMPI dan DPW PPP Jateng memiliki intensitas masalah yang rendah. Dalam proses dinamika komunikasi ini, terdapat beberapa problem. Pertama, tidak sampainya informasi kepada komunikan. Seperti pernyataan ketua DPW PPP Jateng, Masruhan samsurie,

“kadang komunikasi kami tersendat. Karena kadang penyampaian informasi yang tidak utuh. Jadi kadang kami mengalami kendala dalam komunikasi.”

Kedua, komunikasi yang terjalin di internal PW GMPI Jateng kadang mengalami stagnasi, sehingga komunikasi yang dibangun ke partai juga mengalami stagnasi. Hal ini dinyatakan Farid Masduqi, sekretaris wilayah GMPI Jateng.

“justru komunikasi di internal GMPI yang kadang mengalami kemandekan. Ini yang menyebabkan ikut mandeknya komunikasi kita ke partai.”

Sekretaris wilayah GMPI Jateng ini juga menambahkan perihal solusi atas problem internal tersebut. Farid menyebut tidak terlalu dan selalu serius dalam komunikasi adalah salah satu solusi atas problem diatas.

“seharusnya model komunikasi kita di GMPI itu santai tapi berisi, bukan kok malah tegang terus tapi ya tidak ada isinya. Justru kalau sering guyon malah baik menurut saya. Karena suasana jadi lebih cair dan komunikasi pasti lancar.”

Selaras dengan pernyataan sekretarisnya, Nurul furqon menambah catatan dari pernyataan Farid,

“problem utamanya berasal dari internal (GMPI). kalau di GMPI sudah kacau komunikasinya, selesai sudah hubungan komunikasi kami dengan partai. Solusi komunikasi agar cair dan nyaman ya dengan guyon. Benar kata mas Farid, tapi dengan catatan, guyon yang wajar-wajar saja.”

Komunikasi yang terjadi antara PPP Jateng dengan GMPI Jateng berjalan relatif efektif, meski tidak sepenuhnya efektif. Hal ini sesuai dengan keterangan Istajib (2023),

“untuk komunikasi yang ada ya tidak semua dilakukan secara formal keorganisasian, tak jarang juga model komunikasi kami hanya sebatas whatsapp atau nitip salam lewat pengurus yang lain. Karena yang menjadi poin dalam hal ini adalah sampainya informasi dari komunikator ke komunikan, jadi tidak semua harus dilakukan secara formal. Seperti misal ketika partai mengajak kader-kader GMPI untuk turut serta dalam kegiatan konsolidasi ketika ada kunjungan oleh pengurus pusat ke

daerah atau hal-hal yang bersifat informal yang lain. Oleh sebab itu, terkadang, informasi tidak sampai, atau sampai tapi tidak utuh. Disinilah letak miskomunikasi antara partai dan GMPI.”

Hal serupa disampaikan pula oleh ketua GMPI Jateng, Nurul Furqon, saat ditemui di kantor fraksi PPP DPRD Jateng (2023). Nurul Furqon menyatakan bahwa komunikasi yang terjadi dalam hubungan partai politik dan organisasi kolateral yang terafiliasi selalu sejalan, karena tidak begitu banyak kepentingan yang berbeda dalam hubungan partai-sayap. Seperti pernyataannya,

“komunikasi kami (GMPI) dengan DPW sangat baik. Selalu sejalan dengan DPW. Seperti anak yang harus berbakti pada orang tuanya, begitulah GMPI juga berbakti pada partai.”

Pendapat demikian pun ditegaskan oleh ketua DPW PPP Jateng, Masruhan Samsurie, ketika diwawancarai (2023) beliau menyatakan bahwa GMPI sebagai *underbouw* dari PPP harus menjaga dan dijaga komunikasinya.

“GMPI ataupun banom yang lain, mau tidak mau harus menjaga komunikasi dengan partai, begitupun sebaliknya. Karena komunikasi adalah kunci atas kemajuan PPP, yang dalam hal ini juga menjadi tempat afiliasi mereka (GMPI) dalam politik. Jika tidak dijaga, pasti ada saja masalah yang muncul.”

Sekretaris Wilayah GMPI Jateng, Farid Masduqi, menambahkan terkait komunikasi antara partai dan GMPI secara garis besar berjalan dengan baik, namun masih ada hal-hal kecil yang sering terlewat. Seperti terkait konfirmasi terhadap setiap kegiatan yang sudah direncanakan, sampai hal-hal teknis dalam pelaksanaan kegiatan bersama (2023).

“kita (GMPI) itu sering melakukan kesalahan kecil yg membuat komunikasi ini kadang kurang sempurna, seperti kadang kita lupa untuk konfirmasi ke DPW kalau ada kegiatan A. Jadi kadang dari DPW juga menanyakan ini jadi apa enggak. Nah hal semacam itu yang kadang menjadi komunikasi kita kurang

maksimal. Dampaknya ya ke kegiatan tersebut. Untungnya problem semacam ini masih bisa kita atasi. Tapi secara garis besar, komunikasi kami berjalan dengan baik, mas.”

Berbeda dengan sekretaris DPW PPP Jateng, Suyono, saat ditemui di kantor DPW PPP, beliau menyatakan bahwa hanya mengetahui komunikasi terkait administrasi. Suyono menganggap komunikasi yang terjalin sudah sesuai dengan semestinya (Suyono, 2023).

“saya memang tidak paham secara menyeluruh tentang komunikasi partai dengan GMPI. saya tahunya ya tentang administrasi GMPI sebagai sayap pemudanya PPP. Sejauh ini, GMPI ya bagus komunikasinya. Kalau ada yang bingung (tentang administrasi keorganisasian) pasti langsung menghubungi saya. Apalagi mas Farid itu, sering ngajak saya diskusi, tanya-tanya soal organisasi.”

Pola komunikasi yang terjalin antara PW GMPI dengan DPW PPP Jateng menggambarkan hubungan yang harmonis. Dalam prosesnya, komunikasi ini berjalan atas kehendak keduanya dalam membangun hubungan organisasi kolateral dengan organisasi induk. Dengan menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka, DPW PPP dan PW GMPI Jateng bertujuan untuk mengembangkan lingkungan komunikasi dimana ada kebebasan dalam menyampaikan masukan, gagasan bahkan kritik atas isu tertentu. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan diantara keduanya.

Dapat diketahui bahwa dinamika relasi yang terjadi antara PW GMPI dan DPW PPP Jateng tidak terlepas dari pola relasi yang terjadi. Dalam proses menjalani komunikasi dua arah antara DPW PPP dan PW GMPI Jateng, memiliki beberapa kendala. Pertama kurang efektif komunikasi yang terjalin. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Tersampainya informasi yang tidak utuh menjadi salah satu penyebabnya. Faktor yang lain berupa komunikasi di internal PW GMPI Jateng yang mengalami stagnasi.

Komunikasi yang kurang efektif menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi PW GMPI, secara khusus, dan juga DPW PPP Jateng. PW GMPI Jateng sebagai bagian dari DPW PPP Jateng mau tidak mau harus tetap menjaga keharmonisan dalam

hubungannya dengan DPW PPP. Karena bagaimanapun, posisi PW GMPI sebagai organisasi kolateral yang terafiliasi dengan DPW PPP harus dijaga eksistensinya. Sesuai dengan Poguntke, organisasi kolateral terafiliasi memiliki kontrol yang tinggi oleh partai. Secara historis, PW GMPI Jateng sebagai organisasi yang dibentuk oleh DPW PPP Jateng pastinya memiliki banyak kesamaan dalam mencapai tujuan politiknya.

Dengan intensitas kepentingan yang rendah, PW GMPI dan DPW PPP Jateng selalu mencari penyelesaian atas berbagai masalah yang terjadi. Seperti dalam cara menyelesaikan komunikasi yang mandek, candaan menjadi salah satu cara penyelesaiannya.

Penggunaan model komunikasi yang inklusif menjadi sebuah strategi baru dalam menjalin komunikasi antara PW GMPI dengan DPW PPP Jateng. Dengan model komunikasi dua arah yang inklusif, informasi yang disampaikan dalam komunikasi ini mengandung hal-hal yang mudah dimengerti oleh komunikan.

Peningkatan produktivitas menjadi salah satu *output* komunikasi antara DPW PPP dan PW GMPI Jateng. Kedua organisasi ini memperbanyak kerja-kerja politik organisasi seperti penjangkauan minat para pemuda di berbagai daerah. Dengan meningkatnya produktivitas ini, akan semakin cepat untuk menjangkau tujuan keduanya.

B. Pola Partisipasi

Kemudian terkait partisipasi atau keterlibatan GMPI dalam proses pengambilan keputusan di partai, ketua DPW PPP Jateng, Masruhan, menyatakan bahwa keterlibatan setiap unsur banom selalu dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan.

“partai selalu melibatkan unsur-unsur banom dari PPP, seperti GMPI, AMK, GPK maupun WPP. Soalnya gini, mas, setiap pimpinan banom pasti ada yang merangkap di kepengurusan DPW, seperti mas Nurul, itu juga menjadi wakil ketua di susunan DPW.”

Hal diatas ditegaskan oleh Nurul Furqon, dinyatakan bahwa GMPI juga menjadi bagian dalam proses dialog politik untuk menentukan kebijakan partai.

“ya, GMPI selalu berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat partai. Meskipun bukan atas nama GMPI, tapi orang-orang GMPI pasti ada dalam proses itu. Dari sinilah GMPI bisa berdialog dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan.”

Dinamika yang terjadi dalam relasi antara PW GMPI dan DPW PPP Jateng yaitu berkenaan dengan partisipasi. Tingkat partisipasi yang rendah dalam mengikuti proses-proses politik di PPP Jateng, menjadi problem utama partisipasi GMPI dalam proses politik DPW PPP Jateng. Hal ini dinyatakan oleh ketua PW GMPI Jateng, Nurul Furqon,

“saya sadari memang untuk partisipasi kader GMPI dalam berpolitik bersama PPP itu kurang.”

Ketua DPW PPP Jateng, Masruhan Samsurie, menyampaikan hal yang berbeda. Masruhan menyampaikan bahwa pertisipasi PW GMPI sudah cukup bagus. Namun dengan catatan kalau pimpinan organisasinya bisa memberi contoh (partisipasi) yang baik.

“GMPI sudah sangat bagus itu partisipasinya dalam PPP. Tapi yang menjadi catatan saya, pimpinan organisasinya harus bisa jadi contoh yang baik. Ketika ada kegiatan PPP, (pimpinan GMPI) tidak boleh hanya menyuruh untuk ikut, tapi juga harus ikut, agar menjadi contoh yang baik.”

Istajib sebagai wakil ketua DPW PPP Jateng bidang OKK (organisasi, kaderisasi dan keanggotaan) juga memberi pernyataan bahwa organisasi sayap harus turut memberikan sumbangsih pemikirannya dalam membuat keputusan partai agar bisa menjadi keputusan yang utuh.

“kami mewajibkan itu (keterlibatan organisasi sayap), mas. Karena begini, partai tanpa anggota tidak berarti apa-apa. Dan anggota partai kan banyak yang tersebar di organisasi-organisasi sayap itu. Maka dari itu, misal partai akan

membahas tentang strategi pemenangan, tidak mungkin hanya dibahas oleh DPW saja. Pasti melibatkan organisasi sayapnya. Karena kita (DPW) sadar, pemikiran mereka (organisasi sayap) sangat berarti. Kalau tidak begitu ya bisa pergi semua itu organisasi sayapnya, karena merasa tidak digunakan.”

Berkaitan dengan hal itu, sekretaris wilayah GMPI, Farid Masduqi menjelaskan bahwa pelibatan GMPI dalam pengambilan keputusan DPW selalu dilibatkan.

“kami selalu terlibat untuk menentukan kebijakan di DPW. Ini (pelibatan) harus ada, karena kami juga memiliki gagasan-gagasan yang mungkin bisa jadi masukan dalam rapat-rapat DPW.”

Pelibatan organisasi sayap dalam proses pengambilan keputusan DPW PPP Jateng juga diafirmasi oleh Suyono. Dinyatakan bahwa partisipasi sayap dalam mempengaruhi kebijakan partai harus ada.

“organisasi sayap partai tentunya harus bisa mempengaruhi kebijakan partai, mas. Soalnya kalau tidak dipengaruhi, siapa yang akan membantu membuat kebijakan?”

Kemudian dalam proses mempengaruhi kebijakan partai tersebut, Suyono menjelaskan bahwa proses dialog intelektual adalah cara yang sesuai.

“cara yang sesuai ya dengan diskusi, adu gagasan, itulah cara organisasi sayap memperluas wawasan untuk terciptanya sebuah keputusan yang tepat. Kalau cuma gas-gasan ya semua orang bisa, mas.”

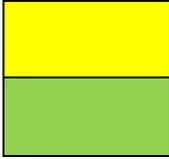
PW GMPI Jateng sebagai organisasi sayap partai dari DPW PPP Jateng, tentunya memiliki pengaruh dalam proses-proses politik di DPW PPP Jateng. Sebagai organisasi kolateral yang terafiliasi, PW GMPI selalu terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan DPW PPP Jateng, meski tidak begitu berpengaruh karena memiliki tingkat otonomi/independensi yang rendah.

Hal-hal yang bisa dilakukan oleh PW GMPI dalam proses pengambilan keputusan di DPW PPP Jateng adalah dengan melakukan lobi, dialog, sampai menyatakan sikap.

Tabel 4.5

Struktur kepengurusan DPW PPP Jateng

Susunan kepengurusan DPW PPP Jateng	
Ketua	Masruhan Samsurie
Sekretaris	Suyono, S.IP., M.Si.
Wakil Sekretaris	Farid Masduqi
Wakil Sekretaris	Nurfariskha, AMd.Kom
Bendahara	dr. Hj. Sholeha Kurniawati
Wakil Bendahara	Fajarsari Christiawan, SE.
Wakil Bendahara	Umi Dalyuni, S.Pd.I
Wakil Ketua Bidang Fungsional	
Bidang OKK 1	Drs. H. Istajib AS.
Bidang OKK 2	H Abdul Aziz, M. Si.
Bidang OKK 3	Abdul Syukur, S. Ag.
Informasi dan Komunikasi	Muhammad Ngainirrichadl, SHI., MM.
Pengelolaan Aset Partai	Djoko Nurhadi, SH.
Data dan Digital	Muhammad Naryoko, M. Si.
Wakil Ketua Bidang Isu Strategis	
Dakwah dan Pembangunan Pesantren	KH. Ahmad Nawawi Kholil
Buruh, Tani, dan Nelayan	Dra. Hj. Munawaroh Nurhadi
Media Sosial	Muhammad Sidqi, S. IP.
Advokasi dan Hukum	H. Muhammad Syahir, SH., MH.
Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Abd. Afif Efendi, S. Sos.I
Perempuan dan Anak	Uswatun Khasanah, S. Sos. I
Pendidikan dan Kebudayaan	Uswatun Marhamah, M. Pd.
Kesehatan dan Sosial	Presti Handayani
Ekonomi Kreatif	Hj. Hilma A'yunina, S. Ag., M. Pd.
Pemuda dan Mahasiswa	Yogy Pratama M. Abdul Ghany, SH.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil	
H Abu Nafi, SH.	
Inna Hadianala, SE.	
H Nurul Furqon, SE., MM.	
Hj. Nurul Hidayah Supriati, M. Si.	
Hj. Nur Hasanah, SH.	
H Tubagus Fahmi, SH.	
Drs. Mujadin PM.	
H Yusuf Cahyono, SH.	
Evi Rahmawati, S. Pd. I	
H Ulwan Hakim, ST.	
H Eddi Santoso, S. Pd.	



Mantan Pengurus Wilayah GMPI

Pengurus wilayah GMPI

Dengan komposisi kepengurusan DPW PPP yang disetiap bagiannya ada kader dan pengurus wilayah GMPI, menandakan adanya proses keterlibatan dalam semua urusan politik DPW PPP Jateng.

Keterlibatan PW GMPI dalam berbagai kegiatan politik DPW PPP Jateng menjadi bukti bahwa tingkat partisipasi PW GMPI dalam proses politik di DPW PPP Jateng cukup tinggi. Partisipasi ini tidak hanya sekedar berbagi gagasan politik, melainkan keterlibatan PW GMPI dalam pelaksanaan fungsi DPW PPP sebagai partai politik.

Partisipasi PW GMPI dalam proses politik di DPW PPP Jateng, tingkat partisipasinya cukup tinggi. PW GMPI mampu mendistribusikan kader-kadernya dalam setiap posisi di DPW PPP Jateng. Sebagai organisasi yang mempunyai hubungan historis, aspiratif, dan programatis dengan PPP yang dipertegas dengan sikap anggota yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada PPP, PW GMPI Jateng memiliki komitmen konstitusional dan kewajiban moral terhadap eksistensi, kebesaran, dan masa depan PPP. Dengan modal memiliki banyak kader yang berada di setiap lini PPP Jateng, GMPI mampu mempengaruhi berbagai kebijakan partai. Salah satu contoh kebijakan yang dipengaruhi oleh GMPI adalah pemberdayaan banom PPP Jateng.

Pelaksanaan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, DPW PPP Jateng melibatkan organisasi sayapnya guna menjangkau masyarakat yang lebih dalam. PW GMPI Jateng menjadi salah satu dari empat organisasi sayap PPP yang aktif dalam berbagai kegiatan *public hearing*. Kemudian dalam sosialisasi politik, PW GMPI lebih aktif melakukan sosialisasi politik di masa menjelang pesta demokrasi. Hal ini menjadi nilai khusus di hadapan DPW PPP. Meski sosialisasi yang dilakukan memiliki ritme yang fluktuatif,

setidaknya PW GMPI Jateng telah membantu DPW PPP Jateng dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik ini.

C. Pola Kaderisasi

Selanjutnya mengenai kaderisasi yang dilakukan DPW PPP Jateng terhadap anggotanya, khususnya GMPI, terdapat ritme khusus untuk membina kader maupun anggota yang tergabung dalam banom PPP. Selaras dengan pernyataan Masruhan,

“untuk banom, sengaja kita buat kegiatan khusus agar kaderisasi di PPP Jateng berjalan dengan sempurna. Seperti LDK (latihan dasar kepemimpinan), FGD (focus group discussion), dan pelatihan-pelatihan yang menunjang kebutuhan organisasi. Berbeda dengan anggota PPP yang tidak gabung dalam sayap partai.”

Nurul Furqon menambahkan bahwa tidak hanya kaderisasi secara formal yang dilaksanakan oleh PPP terhadap GMPI Jateng, kaderisasi non formal pun juga dilakukan.

“bukan hanya kaderisasi formal, GMPI juga mendapat model kaderisasi secara non formal. Kami (GMPI) sering, paling tidak sebulan sekali, diajak nongkrong bareng sama pengurus DPW untuk membahas tentang partai, atau hanya sekedar ngobrol santai. Ini yang membuat kita merasa dianggap.”

Kemudian berkenaan dengan kaderisasi, pola hubungan antara PW GMPI dengan DPW PPP Jateng yang terjadi justru cukup dinamis. Pertama, PW GMPI Jateng dicetak sebagai kader PPP muda yang intelektual. Seperti yang disampaikan oleh Istajib, PW GMPI harus menjadi kader muda PPP yang intelektual, berwawasan luas, serta progresif.

“kami (DPW) sengaja membentuk GMPI itu sebagai kaum muda PPP yang memiliki wawasan luas. Pelatihan-pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik, serta kajian-kajian yang diberikan pada GMPI dilakukan agar GMPI jadi kader muda PPP yang berintelektual.”

Hal ini serupa dengan pernyataan Masruhan, dinyatakan bahwa ada perbedaan dalam proses kaderisasi diantara banom-banomnya.

“dari keempat banom PPP, yang secara khusus dikader habis-habisan ya GMPI. GMPI harus memiliki karakter pemuda yang kritis. Berbeda dengan GPK (Gerakan Pemuda Ka’bah) misalnya, GPK pembinaannya lebih ke arah kedisiplinan. Atau AMK (Angkatan Muda Ka’bah) itu lebih ke arah kreativitas.”

Kedua, proses kaderisasi yang dilakukan secara non formal memiliki banyak tantangan. Masruhan menyampaikan bahwa kaderisasi non formal adalah tugas semua pengurus DPW PPP Jateng. Berbeda dengan kaderisasi formal.

“kalau kaderisasi formal sudah ada bagiannya sendiri, bidang OKK. Tapi kalau kaderisasi non formal, semua pengurus DPW wajib melaksanakannya. Disinilah letak permasalahannya, kaderisasi non formal kan bisa dilakukan dengan apa saja. Bisa dengan ngopi, jalan-jalan, dan sebagainya. Semua yang dilakukan untuk proses ini bisa jadi malah tidak menyentuh tujuannya sama sekali, karena tidak bisa fokus. Yang menjadi catatan adalah, kaderisasi non formal ini juga memiliki tujuan, minimalnya kader merasakan keberadaan PPP sebagai organisasi politik yang siap menampung aspirasinya.”

Hal serupa disampaikan oleh Nurul Furqon, juga ditambahkan bahwa tidak semua kader GMPI tahu mengenai kaderisasi non formal ini.

“kalau yang merangkap jabatan di DPW ya pasti tahu, mas. Kalau yang tidak masuk kepengurusan DPW ya tidak tahu. Maka dari itu kaderisasi non formal itu ibarat pisau mata dua, kalau berhasil ya bagus. Kalau gagal, bisa membuat karakter kader bisa jadi pragmatis.”

Sebagai sekretaris wilayah GMPI Jateng, Farid Masduqi, menekankan bahwa kaderisasi non formal harus menjadi alternatif kaderisasi formal.

“model kaderisasi non formal sebenarnya sangat bagus, namun perlu diperhatikan juga, proses pelaksanaannya harus bisa

menjadi alternatif dari kaderisasi formal. Mengingat pentingnya tujuan kaderisasi.”

Ketiga, perbedaan model tujuan kaderisasi antara DPW PPP dan PW GMPI Jateng. Tujuan kaderisasi DPW PPP, disampaikan Istajib, adalah terciptanya kader muda PPP yang berintelektual, berwawasan luas, serta progresif.

“kami (DPW) sengaja membentuk GMPI itu sebagai kaum muda PPP yang memiliki wawasan luas. ... agar GMPI jadi kader muda PPP yang berintelektual.”

Berbeda dengan tujuan kaderisasi dari GMPI sendiri, Nurul Furqon menyampaikan bahwa kaderisasi yang dilakukan di GMPI bertujuan untuk memperkuat loyalitas dan solidaritas PPP muda.

“coba lihat kader-kader GMPI, mereka loyal dan solid. Ini merupakan buah kaderisasi di GMPI. dan tentunya semua ini untuk PPP.”

Farid menambahkan bahwa perihal wawasan dan intelektual itu bisa disesuaikan dengan kehendak kader, tapi untuk loyalitas dan kesolidan kader adalah hal fundamental.

“kami (PW GMPI) menganggap bahwa hal yang sangat mendasar adalah loyalitas. Bagaimana mungkin kader yang tidak loyal bisa digembleng kesana-kemari? Jadi yang pertama harus loyal. Kemudian setelah memiliki loyalitas tersebut, tinggal ditumbuhkan kesolidannya. Hal semacam inilah yang menurut kami lebih fundamental.”

Suyono menyebutkan bahwa perbedaan tujuan kaderisasi ini merupakan proses dialektik antara GMPI dan PPP Jateng.

“berbeda seperti ini kan seru, mas. Suasana partai jadi lebih hidup. Meskipun nanti pada ujungnya tetap akan jadi satu, tapi proses dialektik ini yang harus tetap dijaga.”

Sekretaris DPW PPP, Suyono, menjelaskan terkait kaderisasi yang dilakukan untuk menjaga loyalitas anggota maupun banom dari PPP.

“untuk menjaga loyalitas, kaderisasi sangat diperlukan, mas. Bayangkan mereka (anggota maupun kader) hanya direkrut, apa yang akan terjadi jika tidak ada hubungan timbal balik? Selesai ini partainya.”

Hal sama disampaikan oleh Farid Masduqi, organisasi tanpa pembinaan tidak akan berjalan.

“GMPI sebagai underbouw PPP jika tidak dikader akan mati muda.”

Menambah pernyataan Suyono, Istajib menerangkan bahwa kaderisasi bertujuan untuk ideologisasi dan membentuk karakter anggota maupun kader yang sesuai dengan visi partai.

“tujuan kaderisasi yang dilakukan adalah ideologisasi dan membentuk karakter kader dan anggota PPP agar sesuai dengan cita-cita PPP yang tertuang dalam visi PPP.”

Distribusi kader GMPI dapat terakomodir dengan baik oleh PPP Jateng. Ketua GMPI Jateng mengapresiasi DPW PPP Jateng karena bisa mengakomodir kader-kader GMPI yang didistribusikan, baik dalam kepengurusan partai maupun dalam kontestasi legislatif di Jawa Tengah.

“saya sangat bersemangat ketika kader-kader kami (GMPI) diterima dengan baik dalam kepengurusan partai. Kemudian juga saat pen-caleg-an kemarin, semua bacaleg dari GMPI, baik kabupaten/kota maupun provinsi, bisa diterima tanpa terkecuali. Saya sangat mengapresiasi itu.”

Masruhan Samsurie merasa senang ketika GMPI juga aktif mendistribusikan kadernya dalam susunan pengurus DPW PPP Jateng.

“saat saya terpilih jadi ketua DPW, temen-temen GMPI berbondong-bondong masuk di setiap lini kepengurusan. Saya sangat senang mendengar kabar baik ini. Dan ini, menurut saya, adalah salah satu bentuk kerjasama untuk PPP Jateng yang lebih baik dengan didistribusikannya kader-kader GMPI dalam kepengurusan DPW PPP Jateng.”

Selaras dengan pernyataan Istajib, DPW PPP Jateng selalu mengakomodir kader-kader banom PPP yang ingin berperan dalam membawa kemajuan PPP.

“selagi niatnya baik, untuk kemajuan partai dan kemaslahatan umat, ya DPW pasti menerima itu. Terlebih jika partai membutuhkan posisinya, seperti komposisi kepengurusan di DPW, setiap banom ada perwakilannya di DPW.”

Suyono juga menegaskan bahwa GMPI harus memberikan kader-kader terbaiknya dalam proses-proses politik PPP.

“GMPI sebagai sayap politik PPP harus aktif dalam proses-proses politik di PPP melalui kadernya, dan itu harus siap. Misalnya ketika partai minta sejumlah kader GMPI untuk maju menjadi calon legislatif dari PPP, GMPI harus siap memberikan kadernya sejumlah yang diminta, kalau bisa lebih dari yang diminta.”

Sedikit berbeda dengan pernyataan sekretaris DPW, sekretaris wilayah GMPI Jateng menyatakan bahwa distribusi bakal caleg dari GMPI untuk PPP atas inisiatif dari GMPI sendiri.

“untuk pendistribusian bakal calon legislatif dari GMPI kemarin itu atas inisiatif dari GMPI sendiri. GMPI hanya mendapat arahan dari ketua DPW untuk berpartisipasi menjadi bakal calon legislatif dari PPP. Total kader GMPI se Jawa Tengah yang maju menjadi calon legislatif dari PPP sebanyak 112 caleg di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.”

Kaderisasi pada PW GMPI bisa digunakan sebagai metode perluasan basis massa dari PPP. Hal ini berkaitan dengan pengembangan PW GMPI oleh DPW PPP sebagai instrumen penting dalam penarikan simpati dan dukungan massa baik untuk memenangkan kontestasi politik atau untuk mensosialisasikan keputusan-keputusan politik yang diproduksi oleh DPW PPP. Selain perluasan basis massa, PW GMPI juga dibentuk agar menjadi organisasi cendekiawan sesuai kapasitasnya. Dengan demikian, adanya sebuah organisasi sayap yang memiliki banyak kader berintelektual bisa

menjadi daya tarik tersendiri dikalangan akademisi dan para cendekiawan. Karena dalam kenyataannya, banyak dari kaum cendekiawan tidak tertarik dalam aktivitas politik seperti bergabung dengan partai politik. Dengan bergabungnya para cendekiawan, pemikiran-pemikiran yang dihasilkan bisa ditrasformasikan pada kader PPP, sehingga diharapkan DPW PPP Jateng menjadi partai yang berkarakter, berwawasan, berintegritas, cerdas, dan bersih dari korupsi.

Merujuk pada hasil penelitian diatas, diketahui bahwa pola relasi antara DPW PPP dan GMPI Jateng berjalan cukup baik. Hal ini sesuai dengan teori relasi partai politik dan organisasi sayap oleh Poguntke (2006), bahwa organisasi kolateral/sayap yang terafiliasi dengan partai politik, secara teknis, bersifat independen, namun merupakan organisasi yang mewakili fungsi serta strategi partai politik. Dengan kata lain, GMPI merupakan suborganisasi yang dibuat oleh PPP.

Kemudian dalam proses kaderisasinya, terdapat dinamika antara DPW PPP dan PW GMPI Jateng. Perbedaan tujuan kaderisasi menjadi salah satu faktor penghambat keharmonisan antara keduanya. Kaderisasi yang dilakukan DPW PPP terhadap PW GMPI Jateng bertujuan untuk mengembangkan wawasan serta membentuk karakter kader GMPI yang berintelektual dan progresif. Sedangkan PW GMPI Jateng sendiri memiliki tujuan dalam kaderisasi. Menjadikan kader GMPI yang memiliki loyalitas dan kesolidan yang tinggi untuk eksistensi GMPI dan PPP Jateng, pada umumnya. Secara eksplisit memang berbeda tujuan, tapi pada dasarnya, secara implisit mereka sama-sama menginginkan kemajuan pada PPP.

Dilihat dari peran dan fungsi PW GMPI untuk memperluas basis massa PPP, peran yang dijalankan cukup krusial. Dalam segi penjaringan kader muda PPP, PW GMPI menjadi garda terdepan dalam proses ini. Sebelum terjun memperdalam kehidupan politiknya, bagi kader muda PPP, biasanya memulai proses di GMPI terlebih dahulu. Hal ini yang menjadi landasan tujuan kaderisasi di GMPI untuk menumbuhkan loyalitas dan kesolidan di kalangan PPP muda.

Lalu fungsi dari GMPI dalam penjaringan ini adalah sebagai perekrut anggota baru dan menanamkan nilai organisasi agar sesuai dengan tujuan kaderisasi dan organisasi. Kemudian menjalankan proses pembinaan, penjagaan dan pengembangan anggota. Membina dan menjaga berarti dalam setiap pergerakannya disesuaikan dengan visi GMPI, dan PPP secara umum, agar tetap terjaga pada jalur pemahaman dan tujuan yang sama. Pengembangan anggota menjadi pilihan dalam proses kaderisasi, tapi akan menjadi pilihan yang bijak jika dilaksanakan, karena kader akan semakin kontributif jika memiliki skil dan pengetahuan yang luas.

Evaluasi dan melakukan kontrol organisasi bisa dijadikan sebagai indikator kaderisasi, melihat seberapa jauh nilai-nilai organisasi diterima anggotanya, dampak

apa saja yang diberikan PW GMPI dalam proses kaderisasinya, serta sejauh mana perkembangan anggotanya. Untuk melakukan hal semacam ini diperlukan perencanaan dan konsep yang matang dari pengurus GMPI Jateng.

GMPI sebagai *underbouw* dari PPP, memiliki hubungan politik secara formal. Hal ini yang menjadi jaminan bagi PPP untuk menjaga tawaran elektoral dari GMPI. dalam proses politiknya, GMPI selalu sejalan dengan kehendak PPP. Hal ini yang membenarkan pendapat Poguntke, bahwa ditinjau dari keanggotaan, anggota GMPI juga menjadi anggota, bahkan pengurus, dari PPP. Keterlibatan anggota GMPI dalam keanggotaan maupun kepengurusan PPP membuat kemungkinan terjadinya tumpang tindih keanggotaan maupun kepengurusan. GMPI mendapat kontrol yang tinggi dari PPP. Hal ini menyebabkan otonomi GMPI relatif rendah.

Menjelang pesta demokrasi, GMPI memiliki daya tawar yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan PPP Jateng. Hal ini disebabkan oleh jaminan basis masa GMPI untuk PPP yang bisa dijadikan modal dalam mempengaruhi kebijakan PPP. Tidak hanya untuk mempengaruhi kebijakan, GMPI memanfaatkan situasi ini untuk mempromosikan diri pada dunia politik. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi 112 kader GMPI yang maju menjadi calon legislatif dari PPP Jateng di DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II.

Intensitas hubungan antara GMPI dan PPP tidak selalu berjalan harmonis. Hubungan ini akan meningkat keharmonisannya tatkala ada persamaan kepentingan antara keduanya. Sebagai contoh, GMPI menjadi jala bagi PPP dalam merangkul para pemuda. Sebagai media sosialisasi dan perekrutan PPP, GMPI mestinya memasang kader potensialnya pada posisi yang bisa dijadikan patron dalam menggapai tujuan ini.

GMPI Jateng memiliki peran penting dalam perekrutan. Hal ini menjadi interaksi yang penting dalam dinamika sebuah partai. PPP membutuhkan penyegaran berupa kader-kader potensial yang baru, lalu GMPI membutuhkan posisi yang strategis dengan memasang kader-kadernya dalam PPP.

Proses pembinaan kader dalam format kaderisasi PPP-GMPI Jateng, mengedepankan asas saling memberi kemanfaatan. PPP sebagai organisasi induk memberi manfaat kepada GMPI berupa akomodasi organisasi, dan GMPI memberi manfaat kepada PPP dengan menjaga dukungan terhadapnya. Proses menjaga

dukungan ini dilakukan dengan berbagai cara, membuat kegiatan rutin seperti pendidikan politik dan diskusi, hingga memperluas basis massa dengan mendekat pada organisasi kepemudaan atau komunitas yang sesuai.

Eksistensi dan kegiatan GMPI tentunya memberikan manfaat bagi PPP. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad, dkk. (2013) bahwa loyalitas simpatisan partai perlu dijaga, karena dalam masyarakat demokratis, rakyat diberikan kemerdekaan untuk berpindah partai sesuai minat dan keyakinannya. Maka menjadi sangat mungkin kader dan simpatisan partai beralih ke partai lain jika loyalitas mereka terhadap PPP melemah atau hilang sama sekali. Untuk mencegah kemungkinan ini, PPP memiliki langkah-langkah strategis. Berbagai upaya dilakukan, baik di tubuh PPP maupun di GMPI.

Kegiatan yang dilakukan PPP seperti berbagi kepada sesama, seminar ataupun *talkshow*, silaturahmi kepada warga, turut serta dalam penggalangan donasi bencana, mengadakan kegiatan keagamaan, dan lainnya, merupakan upaya PPP dalam menjaga hubungan dengan konstituennya.

Hal serupa juga dilakukan oleh GMPI. karena GMPI merupakan organisasi kolateral yang terafiliasi pada PPP, upaya yang dilakukannya pun tak jauh berbeda. Temuan ini sejalan dengan pendapat Nabilah (2015) bahwa pada kenyataannya, organisasi sayap atau *underbow* menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap partai memiliki andil yang besar bagi partai politik baik dalam upaya sosialisasi, implementasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Keberadaan GMPI sangat dibutuhkan oleh PPP guna mengontrol dan mengevaluasi kinerja PPP, atau lebih luas GMPI turut mengevaluasi dan mengontrol yang berada di legislatif, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal ini dilakukan dengan peran kader-kader GMPI yang menjadi politisi dari PPP. Sementara pengawasan eksternal bisa dilakukan dengan advokasi melalui *public hearing* ataupun kritikan melalui media massa.

BAB V

Penyelesaian Dinamika dalam relasi antara PW GMPI dan DPW PPP Jawa Tengah

Proses penyelesaian segala problem yang terjadi dalam dinamika relasi antara DPW PPP dengan PW GMPI Jateng bisa dikatakan cukup efisien. Hal ini merupakan sebuah kewajaran dalam dinamika relasi antara organisasi kolateral yang terafiliasi dengan partai. Keduanya mampu menghadirkan berbagai solusi atas problem-problem yang ada.

A. Solusi Alternatif

komunikasi yang sering gagal ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang antara komunikator dan komunikan. Hal ini sering terjadi karena respon yang ada berdasarkan persepsi terhadap apa yang disampaikan. Dalam kasus ini, model penyelesaiannya dengan cara memastikan bahwa respon yang diberikan juga sesuai dengan informasi yang disampaikan.

Kemudian karena penempatan komunikasi dalam konteks yang kurang tepat. Dengan sejuta kesibukan pekerja politik, komunikasi yang terjalin dalam masing-masing organisasi ini bisa tersendat hanya karena situasi yang kurang mendukung. Sebagai contoh, pernah terjadi miskomunikasi antara DPW PPP Jateng sebagai pelaksana acara Resepsi Harlah PPP di Jawa Tengah, dengan PW GMPI sebagai bagian dari pelaksana kegiatan tersebut. Koordinasi yang dilakukan diluar rapat resmi menjadi bukti kongkrit atas komunikasi yang gagal akibat suasana tidak kondusif.

Saat ditanya mengenai solusi atas masalah yang melanda komunikasi dua arah antara DPW PPP dan PW GMPI Jateng, Masruhan menyatakan bahwa penyampaian informasi yang baik tidak hanya dilakukan sekali, melainkan diulangi juga dikonfirmasi.

“untuk mengatasi hal itu, ya harus diulangi lagi. Kemudian dikonfirmasi lagi informasinya. Sehingga bisa komunikatif, mas.”

Sejalan dengan seperti yang disampaikan Masruhan Samsurie, Istajib juga menambahkan bahwa peran distributor informasi sangat penting.

“dalam model komunikasi kan ada yang namanya penyampai informasi dan penerima informasi. Nah diantara mereka, saya menyebutnya distributor. Sekarang jaman sudah canggih, distributor informasi tidak lagi melalui surat merpati atau kartu pos. Sekarang distributor atau medianya adalah teknologi canggih yang kita genggam. HP ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyampaian informasi itu.”

Dalam proses penyelesaian berbagai masalah komunikasi antara DPW PPP dan PW GMPI Jateng, ada beberapa solusi yang bisa mengatasinya. Mengutip pernyataan Nurul Furqon,

“masalah komunikasi ini hal yang wajar dalam hubungan PPP-GMPI, tapi ya gak bisa dibiarkan begitu saja. Kita (DPW dan PW) selalu mengevaluasi kalau ada masalah. Bisa saling mengakui kesalahan setelah dicari kesalahannya, bisa juga menurunkan ego untuk mengontrol pikiran agar tetap tenang dan kembali fokus pada masalah yang harus diperbaiki, dan sebagainya.”

Solusi yang dirumuskan bersama antara DPW PPP dengan PW GMPI Jateng secara dewasa dan dengan kepala dingin merupakan bentuk penyelesaian problem yang bisa diatasi dengan mudah. Penyelesaian dengan mencari dimana letak kesalahan dalam komunikasi dilanjutkan dengan saling menyampaikan pendapat dan gagasan dalam penyelesaian masalah sangat efektif dalam menjaga hubungan antar organisasi.

Hal ini (penyelesaian masalah) didasarkan pada keberlangsungan hubungan yang harus tetap harmonis. Sehingga bentuk penyelesaian masalah dengan introspeksi diri sebagai proses pengamatan terhadap diri sendiri dan pengungkapan pemikiran dalam yang disadari, keinginan, dan sensasi. Kemudian mengevaluasi pihak yang terlibat. Hal ini sangat penting dalam upaya penyelesaian masalah. Penyelesaian dengan mengevaluasi pihak yang terlibat ini berdasar dengan proses melihat berbagai sudut pandang yang melatar belakangi munculnya masalah.

Tak hanya itu, kompromi juga menjadi proses penyelesaian masalah dalam hubungan antara DPW PPP dan PW GMPI Jateng. Ini menjadi *win-win solution*

penyelesaian masalah, dimana kedua pihak saling mencari jalan yang terbaik untuk tujuan harmonis dan lancarnya hubungan. Kompromi bisa dilakukan jika kedua pihak bisa memahami bahwa hubungan yang baik harus tetap dijaga, hal ini ada dalam relasi antara DPW PPP dan PW GMPI Jateng.

Selain itu, bisa juga dilakukan kolaborasi ataupun akomodasi untuk menghindari kegagalan komunikasi. Lebih dari itu, komunikasi dapat diterapkan sebagai metode yang sangat diperlukan pada setiap penanganan masalah. Berbagai model atau gaya komunikasi dapat diterapkan dalam upaya penyelesaian masalah dalam hubungan DPW PPP dan PW GMPI Jateng. Komunikasi bisa dilakukan secara linear, transaksional, maupun interaksional. Semua sangat berpengaruh dalam keberhasilan penyelesaian masalah.

Berkenaan dengan partisipasi PW GMPI dalam berbagai aspek kerja politik DPW PPP Jateng memiliki intensitas yang tinggi, namun ada beberapa catatan. Seperti yang disampaikan Nurul Furqon,

“kader GMPI itu harus disemangati dulu, mas. Kalau engga ya bakal begitu (minim partisipasi) terus. Seperti kegiatan seminar kemarin, meskipun sudah dikirim pamflet acara, tapi kalau ga diopyaki (baca: disemangati) ya bakalan diam saja.”

Hal semacam ini tidak bisa dijadikan menjadi sebuah kewajaran yang dibiarkan begitu saja. Proses penyelesaian problem terkait intensitas partisipasi PW GMPI Jateng dalam berbagai kerja politik DPW PPP Jateng haruslah tepat. Memberikan semangat ajakan terhadap satu sama lain antar pengurus maupun kader GMPI Jateng menjadi salah satu *problem solving*.

Tak hanya itu, DPW PPP Jateng juga memiliki tanggung jawab atas tinggi-rendahnya partisipasi organisasi sayapnya. Memberi contoh dengan aktif dan konsisten melaksanakan berbagai kegiatan politik di PPP Jateng juga merupakan upaya agar organisasi sayapnya bisa tergugah semangat dan gairahnya untuk turut serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik DPW PPP Jateng.

Selain menyelesaikan problem umum berupa komunikasi, DPW PPP dan PW GMPI Jateng juga merumuskan beberapa formula penyelesaian masalah yang tentang partisipasi politik kader mudanya, khususnya kader dan pengurus GMPI Jateng.

Sebagai contohnya adalah keikutsertaan PW GMPI dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPW PPP Jateng sebagai partai politik di Jawa Tengah. Keterlibatan ini merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan PW GMPI sebagai organisasi kolateral yang terafiliasi dengan DPW PPP Jateng, dimana ada sebuah hubungan timbal balik dalam pola relasi diantara keduanya, sehingga satu dengan yang lainnya menciptakan sebuah dinamika hubungan yang bertujuan baik untuk kesejahteraan bersama dalam menggapai cita-cita politiknya.

Seiring berjalannya waktu, dinamika yang terjadi dalam partisipasi politik PW GMPI Jateng didapati beberapa masalah, seperti tingkat partisipasi yang fluktuatif, hingga kemandekan dalam berpartisipasi untuk kerja-kerja politik DPW PPP Jateng. Dilatarbelakangi munculnya beberapa masalah ini, DPW PPP dan PW GMPI Jateng memberi obat penawar yang dirumuskan bersama, seperti diwajibkan adanya delegasi setiap banom PPP dalam kerja-kerja politik DPW PPP Jateng. Hal ini disampaikan oleh Masruhan Samsurie,

“yang jelas semua banom sekarang wajib mengikuti setiap kegiatan DPW. Keputusan ini dibuat bersama dengan para pimpinan banom. Ini bertujuan agar mereka (banom) aktif berpartisipasi di PPP”

Hal serupa pun disampaikan oleh Istajib, beliau menyampaikan bahwa partisipasi yang fluktuatif bisa diatasi dengan membebani tugas yang sesuai,

“banom itu kalau tidak dikasih tugas kadang masih ada rasa sungkan untuk mengikuti kegiatan DPW, sama seperti saya dulu waktu menjadi ketua GMPI, kadang kalau tidak diajak atau diberi tugas, ya ndak ngapa-ngapain.”

Hubungan yang memiliki partisipasi rendah akan menimbulkan perpecahan yang dapat menjauhkan kedua pihak. Dalam prakteknya, PW GMPI Jateng memiliki tingkatan partisipasi yang fluktuatif. Terkadang sangat partisipatif seperti saat DPW PPP Jateng melaksanakan Musyawarah Wilayah atau saat menjelang pemilu. Saat musyawarah wilayah DPW PPP Jateng yang diadakan di Surakarta pada tahun 2021, keterlibatan PW GMPI Jateng dalam suksesi acara maupun tahap pencalonan ketua DPW sangat tinggi. Saat pencalonan, PW GMPI mendukung Masruhan Samsurie yang

juga demisioner dan salah satu pendiri PW GMPI Jateng. Dengan adanya tendensi posisi politik PW GMPI kepada Masruhan saat musyawarah wilayah DPW PPP Jateng, segala upaya dilakukan untuk kemenangan Masruhan, seperti lobi dan doktrinasi kepada pemilih yang lain.

Kemudian juga saat menjelang pemilu 2024, partisipasi PW GMPI Jateng dalam pencalonan legislatif sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan dorongan dan dukungan dari pimpinan PW GMPI maupun instruksi dari DPW PPP Jateng. Dari 120 bakal calon legislatif yang didaftarkan DPW PPP Jateng, terdapat 48 kader dan pengurus GMPI Jateng.

Tingginya partisipasi dalam pencalonan ini bukan semata karena kesadaran kader dan pengurus PW GMPI yang ingin mengikuti kontestasi politik pada pemilu 2024, melainkan adanya campur tangan dari DPW PPP Jateng juga. Jika DPW PPP Jateng hanya membuka pendaftaran tanpa memberi dukungan, besar kemungkinan partisipasi PW GMPI Jateng tidak sampai 20%. Namun bukan hanya itu, PW GMPI juga memiliki target dalam keikutsertaan dalam pesta demokrasi 2024. Setidaknya dari 13 dapil di Jawa Tengah, target yang harus dicapai yaitu ada minimal satu calon dari GMPI Jateng. Pada faktanya, bahkan lebih dari itu, rata-rata ada 3-4 bacaleg di setiap dapilnya.

Dengan tingkat partisipasi yang fluktuatif ini, terkadang PW GMPI berperan pasif dalam kerja-kerja politik DPW PPP Jateng. Seperti pelaksanaan pendidikan politik yang diadakan rutin oleh DPW PPP Jateng, PW GMPI lebih banyak menarik diri dalam keterlibatan kegiatan ini. Hal ini disebabkan adanya program serupa yang menjadi rutinan PW GMPI Jateng. Akhirnya DPW PPP Jateng dalam beberapa kegiatan pendidikan politik ini melaksanakannya sendiri atau dengan sedikit perwakilan dari PW GMPI.

Atas dasar permasalahan ini, dengan adanya kesamaan program, DPW PPP dan PW GMPI Jateng memecahkan masalah dengan melakukan kolaborasi kegiatan. Hal ini menjadi jawaban atas tantangan yang bila kegiatan ini dilaksanakan sendiri-sendiri akan menimbulkan ketidak optimalan peserta kegiatan. Dengan adanya kolaborasi ini, partisipasi peserta dalam kegiatan pendidikan politik bisa dikatakan

cukup optimal, karena dengan banyaknya peserta kegiatan, akan membuat forum semakin hidup dan dialektis.

Dinamika relasi antara DPW PPP dengan PW GMPI Jateng juga tak terlepas dari munculnya berbagai masalah dalam kaderisasi. Sebagaimana disampaikan oleh Istajib dan Farid Masduqi, mereka menyampaikan cara kaderisasi yang memiliki corak yang identik namun memiliki perbedaan. Artinya kaderisasi yang terjadi masih memiliki jurang pemisah, meski tengah dibangun jembatan untuk menghubungkan. Seperti yang disampaikan Istajib,

“kami mengkader GMPI supaya mereka bisa jadi pemikir-pemikir muda yang hebat, kritis, berwawasan luas, dan tentunya agar PPP Jateng ini bisa dilihat kalau punya SDM yang bagus.”

Sedangkan Farid menerangkan hal yang sama namun agak berbeda,

“kader GMPI Jateng dikader dan dibentuk untuk (menumbuhkan) loyalitas yang bisa dilihat dengan kasat mata, seperti misal, GMPI itu memiliki karakter yang termaktub dalam slogannya, yaitu “Sanggup Mengatasi Tantangan”, nah, proses kaderisasi yang dilakukan ini agar kader-kader yang dimiliki GMPI ini bisa membawa nama GMPI dan PPP Jateng.”

Terlihat jelas perbedaannya, model kaderisasi dari DPW PPP Jateng untuk PW GMPI Jateng, dan model kaderisasi PW GMPI Jateng untuk kader dan anggotanya. Jika dilihat secara implisit, dapat ditemukan kesamaan tujuan dari kedua model kaderisasi ini, yaitu nama baik PPP Jateng. Dengan adanya kesamaan ini, lahirlah berbagai solusi atas perbedaan model kaderisasi untuk kader dan anggota GMPI Jateng. Pertama, DPW PPP Jateng memberikan pedoman kaderisasi secara universal kepada PW GMPI Jateng. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi yang memiliki tujuan sama. Kedua, PW GMPI Jateng diberikan kebebasan dalam model kaderisasi untuk kader dan anggotanya. Hal ini mengingat PW GMPI Jateng sebagai organisasi yang memiliki landasan hukum sendiri, meskipun dalam konteks relasinya adalah organisasi kolateral yang terafiliasi dengan PPP.

Ketiga, menentukan model kaderisasi alternatif baru yang dilaksanakan bersama. Seperti latihan dasar kepemimpinan (LDK) yang merupakan hasil keputusan bersama. Latihan dasar kepemimpinan ini berisikan muatan materi yang juga tercantum dalam pedoman kaderisasi DPW PPP Jateng. Setidaknya ada tiga poin utama dalam melakukan kaderisasi sesuai pedoman dari DPW PPP Jateng; pewarisan nilai-nilai baik dalam organisasi; penjaminan keberlangsungan organisasi; dan sarana belajar bagi anggota.

Keempat, kaderisasi yang berjalan bukan hanya untuk membina anggota atau pengurus GMPI Jateng, melainkan juga sebagai modal untuk merekrut generasi selanjutnya. Pada realitanya, partai politik tidak bisa hidup tanpa melakukan regenerasi, begitupun PPP Jateng. Dalam hal ini DPW PPP Jateng melakukan rekrutmen anggota baru yang nantinya, diharapkan, menjadi penerus perjuangan PPP Jateng. Peran daripada PW GMPI Jateng sebagai banom dan organisasi sayap dari PPP Jateng adalah menghimpun sebanyak-banyaknya anggota baru, yang nantinya harus dibina dalam organisasi GMPI, untuk tujuan yang sudah dicitakan bersama DPW PPP Jateng.

Perekrutan ini menjadi hal wajib bagi PW GMPI Jateng, karena bagaimanapun GMPI sebagai organisasi sayap yang bisa masuk pada lapisan masyarakat yang paling dasar. Ini juga menjadi salah satu keterlibatan PW GMPI Jateng dalam pelaksanaan fungsi DPW PPP Jateng sebagai partai politik. Dengan kelebihanannya yang bisa lebih dalam membaur dengan masyarakat luas, PW GMPI sebagai organisasi sayap, memiliki keuntungan untuk menjaring serta memperlebar massa dan dukungan masyarakat terhadap aspirasi politik untuk PPP.

B. Evaluasi dan Penerapan Solusi

Evaluasi merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi dalam rangka menilai sebuah hasil atau pekerjaan untuk menjadi catatan kegiatan selanjutnya. evaluasi bertujuan untuk mengukur seberapa berhasil sebuah kegiatan atau kinerja yang dilaksanakan. PW GMPI dan DPW PPP Jateng selalu mengadakan evaluasi untuk memetakan permasalahan. Evaluasi biasanya terdiri dari evaluasi rutin dan evaluasi kegiatan. Evaluasi ini dilakukan dengan tidak mengesampingkan beberapa hal seperti menentukan tujuan evaluasi, memilih metode yang tepat, menentukan kriteria evaluasi, melibatkan semua pihak yang terkait, memberi umpan balik, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan di masa depan. Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi relasi PW GMPI dan DPW PPP Jateng.

Evaluasi yang dijalankan secara rutin untuk menilai kinerja, kemajuan, atau efektivitas dari suatu kegiatan, program, proyek, atau pekerjaan. Dalam konteks dinamika relasi antara PW GMPI dengan DPW PPP Jateng yang memiliki masalah komunikasi yang fluktuatif, sederet solusi dihadirkan melalui evaluasi yang selalu dilakukan ketika terindikasi ada masalah. Penyampaian informasi yang dilakukan dengan konfirmasi sehingga informasi yang disampaikan bisa secara utuh diterima oleh komunikan adalah contoh hasil evaluasi yang sudah diterapkan dalam relasi antara PW GMPI dan DPW PPP Jateng. Contoh lain adalah penyamaan persepsi antara komunikator dan komunikan melalui distributor informasi yang berkompeten, sehingga proses komunikasi dapat terlaksana tanpa terjadi miskomunikasi.

Adanya solusi yang dirumuskan bersama-sama menjadi jawaban ultimatum yang tidak boleh disepelekan, karena dengan adanya kesepakatan antara PW GMPI dengan DPW PPP Jateng mengenai jawaban atas berbagai masalah yang melanda komunikasi mereka sebagai organisasi induk dan kolateral yang memiliki tujuan yang sama harus diselesaikan.

Kemudian penerapan solusi atas masalah-masalah yang muncul dalam relasi yang mengerucut dalam dinamika partisipasi menjadi hal yang krusial, mengingat adanya hubungan yang terbangun juga berdasar pada cita-cita politik yang sama.

Penerapan solusi ini mengacu pada proses penerapan dan pelaksanaan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam dinamika partisipasi antara PW GMPI dan DPW PPP Jateng.

Pelibatan dalam pengambilan solusi yang sudah diidentifikasi masalahnya dan diterapkan solusinya dilaksanakan agar bisa mencapai hasil yang diinginkan. Secara kompleks, penerapan solusi ini menjadi sebuah pendekatan yang sistematis untuk pemecahan masalah yang melibatkan PW GMPI dan DPW PPP Jateng untuk mengatasi tantangan dalam dinamika partisipasi ini yang membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan pemantauan yang cermat untuk hasil yang sukses.

Selanjutnya terkait evaluasi atas pemecahan masalah dalam kaderisasi yang terjadi dalam hubungan PW GMPI dan DPW PPP Jateng tidak luput dari perhatian keduanya. Seperti adanya pedoman kaderisasi yang dibuat untuk PW GMPI, kaderisasi formal yang dilakukan bersama dengan melaksanakan latihan dasar kepemimpinan, dan kebebasan menentukan model kaderisasi di internal PW GMPI. Sebuah solusi efektif untuk keselarasan hubungan yang memiliki dua tujuan kaderisasi yang berbeda.

Penerapan yang dilakukan menjadi sebuah perubahan yang signifikan dalam mengatasi masalah kaderisasi ini, karena, PW GMPI sebagai organisasi sayap partai memiliki andil yang besar bagi partai politik baik dalam upaya sosialisasi, implementasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Eksistensi dan kegiatan PW GMPI Jateng tentunya memberikan manfaat bagi DPW PPP Jateng, karena loyalitas simpatisan partai perlu dijaga, dan dalam masyarakat demokratis, rakyat diberikan kemerdekaan untuk berpindah partai sesuai minat dan keyakinannya. Maka menjadi sangat mungkin kader dan simpatisan partai beralih ke partai lain jika loyalitas mereka terhadap PPP melemah atau hilang sama sekali. Untuk mencegah kemungkinan ini, PPP memiliki langkah-langkah strategis. Berbagai upaya dilakukan, baik di tubuh PPP maupun di GMPI.

Oleh sebab itulah, segala permasalahan yang lahir dalam hubungan dinamika relasi antara DPW PPP dengan PW GMPI Jawa Tengah sesegera mungkin

diselesaikan dan dicabut akar masalahnya. Hal ini bertujuan agar keharmonisan dalam relasi antara DPW PPP dengan PW GMPI Jawa Tengah tetap terjaga.

Kemudian terkait evaluasi kegiatan yang dilakukan setiap selesai atau sedang melaksanakan kegiatan juga digalakkan agar terwujudkan kegiatan yang maksimal. Evaluasi ini bersifat internal GMPI dan ada kalanya menjadi bahan evaluasi rutin bersama DPW PPP Jateng. Contoh daripada evaluasi kegiatan ini dimana saat kegiatan kaderisasi tahap I, setelah agenda dilaksanakan, penanggungjawab kegiatan mengumpulkan panitia untuk menilai bagaimana jalannya acara, apa saja kendala yang menghambat, dan apa yang perlu dipertimbangkan untuk kegiatan berikutnya.

Selain hal tersebut, aspek yang dievaluasi juga membahas tentang *output* dan *outcome*, apakah tujuan sudah sesuai dengan perencanaan? Dan apakah dampak bagi peserta sudah maksimal? Bagaimana korelasi dengan partai induk? Tak luput masukan dari peserta menjadi kunci dalam evaluasi, karena peserta memiliki perspektif langsung tentang bagaimana suatu kegiatan atau program dirancang, diselenggarakan, dan diterima.

Dengan melaksanakan kegiatan ini, program kerja selanjutnya akan selalu mendapat nafas baru yang membangun, karena setiap kekurangan yang telah terjadi akan selalu teridentifikasi dan dicarikan solusinya dengan tepat. Seperti hasil evaluasi pada kegiatan kaderisasi tahap I yang mengidentifikasi permasalahan tentang efisiensi waktu dan keseruan acara, perombakan konsep acara dan penekanan pada kedisiplinan waktu dihadirkan pada kegiatan kaderisasi tahap II.

Evaluasi kegiatan semacam ini membantu GMPI untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan di masa depan, memastikan bahwa tujuan utama dari kegiatan dapat tercapai dengan baik.

BAB VI

Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai “Dinamika Relasi Organisasi Sayap Partai Politik Dengan Partai Persatuan Pembangunan Studi Kasus Generasi Muda Pembangunan Indonesia di Jawa Tengah” dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian bahwa PW GMPI Jateng sebagai organisasi kolateral yang terafiliasi dengan DPW PPP sebagai partai politik memiliki pola hubungan pola komunikasi yang relatif efektif, proses pengambilan keputusan selalu melibatkan unsur GMPI, kaderisasi yang dilakukan PPP terhadap GMPI berjalan dengan baik, serta distribusi kader GMPI dapat terakomodir oleh PPP. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Poguntke bahwa organisasi kolateral yang terafiliasi dengan partai politik memiliki hubungan yang baik dan memiliki intensitas masalah yang rendah, atau relatif mudah diselesaikan.
2. Dinamika yang terjadi tidak terlepas dari pola relasi antara GMPI dan PPP Jateng, dimana ada komunikasi, partisipasi, dan kaderisasi. Fakta lapangan yang peneliti dapatkan berupa berbagai masalah yang dapat terselesaikan dengan baik menjadi bukti bahwa hubungan antara organisasi kolateral yang terafiliasi dengan partai politik (induknya) memiliki intensitas masalah yang rendah, atau setiap masalah bisa terselesaikan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan dari keterangan dan penjelasan diatas mengenai “Dinamika Relasi Organisasi Sayap Partai Politik Dengan Partai Persatuan Pembangunan Studi Kasus Generasi Muda Pembangunan Indonesia di Jawa Tengah”, maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran untuk kedepannya.

1. Untuk DPW PPP sebagai partai yang memiliki organisasi kolateral, GMPI, alangkah baiknya untuk senantiasa menjaga keharmonisan hubungan dengan banomnya. Karena bagaimanapun juga, organisasi kolateral yang terafiliasi dengan PPP sedikit banyak memberikan kontribusi yang bermakna kepada PPP.
2. Untuk GMPI Jawa Tengah sudah seyogyanya menjaga pola hubungan dengan organisasi induknya, PPP. Kemudian bisa lebih diperhatikan problem-problem internal GMPI Jateng agar tidak mempengaruhi kinerja organisasi dan hubungan dengan PPP.

C. Penutup

Alhamdulillah, demikian penulisan skripsi dengan judul “Dinamika Relasi Organisasi Sayap Partai Politik Dengan Partai Persatuan Pembangunan Studi Kasus Generasi Muda Pembangunan Indonesia di Jawa Tengah” bisa selesai. Dengan ini penulis berharap, semoga dengan adanya karya tulis ini dapat menambah khazanah keilmuan mengenai organisasi kolateral dan dinamikanya dengan partai politik, serta dapat menjadi bahan rujukan dan referensi tambahan bagi kajian diskusi maupun karya tulis kedepannya.

Penulis dengan kerendahan hati dan kesadaran diri menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, kritik, saran dan masukan dari pembaca sangat diterima oleh penulis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kedepannya. Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada kita semua. *Amiin ya Rabbal 'alamin.*

Daftar Pustaka

- SK PP GMPI Nomor: 255/SK/PP/8/2022. (2022).
- AD/ART Generasi Muda Pembangunan Indonesia. (2021).
- Ariyadi. (2021). Peran Organisasi Sayap Partai Politik Angkatan Muda Partai Golkar dalam Perekrutan Kader Partai Golkar di Kota Banjarmasin.
- Ashari, Y. (2015). Relasi Partai Politik dan Organisasi Kolateral : Studi Kasus Partai Golkar dan KOSGORO di Era Post-Soeharto.
- Asroni, A., Yusup, M., & Sofia, A. (2013). Dakwah dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta. *Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No.1* .
- Baskoro, A. (2014). Ingar Bingar Golkar.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Fahmi, C. (2014). *Relasi Politik OMS dengan Partai Politik: Sebuah Dinamika dan Tantangan Gerakan Sipil di Aceh*. Aceh: The Aceh Institute.
- Furqon, N. (2023, Juni 05). wawancara Dinamika Relasi GMPI dengan PPP Jateng. (J. T. Rohman, Interviewer)
- Istajib. (2023, Juni 02). wawancara Dinamika Relasi GMPI dengan PPP Jateng. (J. T. Rohman, Interviewer)
- Iswari, F. (2019). Arti Penting Organisasi Sayap Partai Politik Serta Hubungannya Dengan Partai Politik Di Indonesia.
- Jateng, S. W. (2023, Januari 11). wawancara. (J. T. Rohman, Interviewer)
- Kulsum, U. (2015). Kerentanan Relasi Organisasi Kolateral Independen dan Partai Politik.
- Masduqi, F. (2023, Juni 05). wawancara Dinamika Relasi GMPI dengan PPP Jateng. (J. T. Rohman, Interviewer)
- Nabilah, D. (2015). *Peran Organisasi Sayap TIDAR (Tunas Indonesia Raya) Dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra Di Jawa Tengah*. Semarang.
- Nurseha, M. (2022, June 18). *Gelar MUSWIL IV, GMPI Jateng Percepat Pembentukan PC GMPI se-Jateng*. From Lingkar.co: <https://lingkar.co/gelar-muswil-iv-gmpi-jateng-percepat-pembentukan-pc-gmpi-se-jateng/>
- Poguntke, T. (2006). *Political Parties and Other Organizations*. Sage Publication.
- Program Kerja GMPI Jateng 2023. (2023).
- Purnamasari, G. C. (2022). Eksistensi, Peran, Dan Pertanggungjawaban Hukum Sayap Partai Politik Kepada Partai Politik.

- Rekomendasi Muktamar IV GMPI. (2021).
- Rengganis, A., Multahibun, & Sarip. (2020). Sayap Partai Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi Desa. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*.
- Rido, A. (2019). Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik Dengan Partai Politik Di Indonesia.
- Ristawati, R., & Salman, R. (2019). Partai Politik Dan Organisasi Sayap Di Indonesia: Fungsi Dan Pengaturannya.
- Samsurie, M. (2023, Juni 05). wawancara Dinamika Relasi GMPI dengan PPP Jateng. (J. T. Rohman, Interviewer)
- Sasmарtha, D. A. (2007). *Fenomena Kelahiran Laskar Partai Persatuan Pembangunan Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- SK no.24/KPTS/SEK/9/2021 Tentang Pedoman Kerja Pimpinan Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI). (2021).
- Suyono. (2023, Juni 06). wawancara Dinamika Relasi GMPI dengan PPP Jateng. (J. T. Rohman, Interviewer)
- Zulfa, S. (2014). Dinamika Relasi Organisasi Kolateral Independen dan Partai Politik: Relasi Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran dokumentasi penelitian



Wawancara dengan bapak Masruhan Samsurie
(ketua DPW PPP Jateng)



Wawancara dengan bapak Istajib (wakil ketua
DPW PPP Jateng bidang OKK)



Wawancara dengan bapak Suyono (sekretaris DPW
PPP Jateng)



Wawancara dengan mas Nurul Furqon (ketua PW
GMPI Jateng)

B. Lampiran Draft Wawancara

Berikut lampiran pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimana hubungan antara PPP dengan GMPI?
2. Bagaimana dinamika relasi antara PPP dan GMPI dalam mengambil keputusan politik?
3. Bagaimana PPP memanfaatkan GMPI dalam memperluas basis dukungan politik?
4. Bagaimana GMPI mempengaruhi kebijakan PPP?
5. Bagaimana PPP dan GMPI berinteraksi dalam menghadapi permasalahan politik yang kompleks?
6. Bagaimana PPP dan GMPI berkolaborasi dalam menggalang dukungan masyarakat?
7. Bagaimana PPP dan GMPI membangun komunikasi yang efektif dalam menjalankan kegiatan politik?
8. Bagaimana PPP dan GMPI memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menghadapi pemilihan umum?
9. Bagaimana PPP dan GMPI membangun kepercayaan dan loyalitas diantara anggota dan simpatisannya?
10. Bagaimana PPP dan GMPI memperkuat kapasitas dan kualitas kadeisasi politik?

Biodata

A. Identitas Diri

1. Nama : Johan Taufiqur Rohman
2. TTL : Malang, 24 September 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dusun Tanggungan Santren, RT/RW 01/10 Desa
Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa
Timur.
6. Telepon : 085726914094
7. Email : johantaufiqq24@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. RAM Bandung (2003-2006)
2. MISS Bandung 1 (2006-2012)
3. Mts SS Bandung (2012-2015)
4. MASS Al-Khoiriyah Hasyim (2015-2018)